Gading

TEMAN REBAHAN:

KAPITALISME & COVID-19

BOSMAN BATUBARA

Teman Rebahan

Kapitalisme dan Covid-19

Teman Rebahan
Kapitalisme dan Covid-19

Bosman Batubara

Penerbit

2020

Teman Rebahan: Kapitalisme dan Covid-19
Penulis : Bosman Batubara
Editor : Dwi Cipta
Tata Letak : Tri Noviana
Desan Sampul : Herdananta Yoga Pratama

Cetakan pertama, Mei 2020
Tebal : xiii + 115 halaman
Ukuran : 13 cm X 19 cm
ISBN :

Penerbit Gading
Jalan Pura I No 203 Sorowajan Baru Yogyakarta
Telp/Faks : (0274)489901
Twitter : @Penerbit_Gading
IG : @Gading_publishing
Facebook : Penerbit Gading
Email : gadingpublishing@yahoo.com,
penerbitgading@gmail.com

www.gadingpublishing.co.id

“sampai perawatan dan penyembuhan, atau mungkin vaksin yang mencegah munculnya kasus serupa di masa depan ditemukan, semua orang yang tiba-tiba buta, serta mereka yang memiliki kontak fisik atau berada dekat dengan para penderita itu, harus dikumpulkan dan diisolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut yang, sekali kena, akan berlipat ganda”—Jose Saramago dalam *“Blindness.”*

“tinimbang bersandar pada doktrin transisi epidemiologis yang menyatakan bahwa penyakit menular akan hilang begitu saja ketika negara-negara telah maju, kita perlu meluncurkan sebuah proposal ekologis: bahwa sejalan dengan berbagai perubahan besar dalam kehidupan sebuah populasi (seperti kepadatan penduduk, pola pemukiman, dan alat-alat produksi), juga akan ada perubahan dalam hubungan kita dengan patogen-patogen, reservoir mereka, dan vektor-vektor berbagai penyakit” —Richard Levins dalam *“Is Capitalism a Disease?”*

PENGANTAR

Ketika saudara Dwi Cipta mengusulkan agar menerbitkan tulisan-tulisan saudara Bosman Batubara mengenai Covid-19, saya dengan serta merta langsung mengiyakan. Saya sudah membaca beberapa tulisan tersebut karena langsung dikirimkan penulisnya ke link pribadi, dan setelah membacanya, saya tak bisa lain kecuali mengatakan bahwa saudara Bosman telah menawarkan suatu pemikiran yang segar sekaligus provokatif. Ia menyebut kehadiran covid-19 ini adalah bagian dari moda produksi kapitalisme. Karena itu jalan keluarnya yang mendasar adalah kritik terhadap kapitalisme itu.

Ada banyak orang memikirkan Covid-19 ini. Para pejuang kemanusiaan berjibaku dari segala lini untuk mengurangi resiko orang-orang, terutama kaum miskin, yang terdampak secara ekonomi akibat persebaran virus ini. Para pekerja tanggap bencana terus berusaha dan merumuskan pola kerja karena mereka kehilangan peta lantaran watak musibah yang dihasilkan covid-19 jauh dan berbeda dengan musibah-musibah konvensional seperti banjir atau gempa. Keserentakan dan keluasan skala menjadi ciri covid-19 ini. Semua orang pada tingkat tertentu adalah penyintas. Maka salah satu modus kerjanya adalah penyintas yang lebih ringan harus membantu penyintas yang lebih berat. Para ilmuwan terus meneliti dan mengolah vaksin

untuk mengenyahkan virus ini. Para teknorat, tentu saja, sembari dilanda bingung tak henti-henti, terus memikirkan respon untuk bertahan dalam situasi ini.

Covid-19 memang benar-benar ajib. Ia telah melakukan revolusi dan mengocok ulang kehidupan. Negara-negara besar menjadi seperti liliput berhadapan dengannya. Kaum hedonis yang gemar berkumpul dan pesta terdiam tidak berkutik. Kaum agama yang menjadikan jamaah sebagai pasar keagamaan menjadi terpana. Festival-festival olahraga yang memutar duit segelintir orang dari kantong jutaan orang harus terhenti. Tentu saja orang sebenarnya tetap bisa bergembira, beribadah atau pun berolahraga, tapi bukan lagi sebagai 'spectacle', salah satu basis peradaban kapitalisme.

Revolusi sedang berlangsung. Covid-19 menyingkapkan realitas pornografis yang selama ini coba ditutupi, yaitu kesenjangan. Jurang asimetris kehidupan dalam segala bidang. Dalam segala tingkatan.

Orang mengajak menghadapi covid-19 dengan narasi-narasi perlawanan. Tetapi paradoksnya, jika yang disebut perlawanan itu secara konvensional kita mestinya keluar dari rumah, kampung, benteng, bahkan negeri kita untuk menyongsong musuh, ini justru kita diperintah untuk tetap di rumah saja. Melawan atau bersembunyi? Itulah ironinya.

Bosman berpikir pada level lain dan mencoba melampaui. Serangan covid-19 ini harus dijadikan momentum untuk memikirkan secara radikal dan

mendasar cara kita mengatur kehidupan selama ini karena kemunculan covid-19 ini sendiri bersumber dari situ. Cara manusia berinteraksi dengan manusia, dengan alam, dan juga nonalam. Dengan demikian, Bosman tidak sekadar mengiyakan “new normal” yang ditawarkan para ilmuwan sosial sebagai formula adaptif baru karena ia hanya polesan di permukaan. Tidak masuk ke inti permasalahan yang melahirkan virus ini. Dengan “new normal” maka kehidupan tetap rentan dan senantiasa terancam oleh serangan yang sama dan berulang. Jika tidak kita terjerembab dalam lubang yang sama.

Apa yang ditawarkan saudara Bosman adalah sebuah “ijtihad” sosial. Kita perlu menanggapi tawaran ini, bukan demi tawaran itu sendiri, tapi suatu bayangan kehidupan masa depan yang lebih adil. Ijtihad bisa benar bisa salah. Dan karena itulah kita perlu ikut memperkaya dan mendorongnya menjadi suatu upaya dan gerakan yang lebih serius, lebih praksis.

Ini buku yang muncul cepat, tetapi tentu saja pemikiran yang dilahirkannya bukan dadakan. Saudara Bosman sudah lama menginvestasikan perhatian dan komitmennya untuk keluar dari cengkeraman kapitalisme ini. Ini hasrat intelektual yang besar dan tidak gampang.

Karena buku cepat mungkin banyak kesalahan ketik atau pilihan kata yang tidak tepat secara tata bahasa di dalamnya. Tapi hal itu sementara dibiarkan saja sebagai kekeliruan teknis kecil sejauh tidak mengubah makna.

Dan mari tetap perhatian pada materi yang substansial di dalamnya.

Hairus Salim HS

Daftar Isi

Sattabi Sappulu

Buku ini adalah reaksi cepat sebagai usaha memahami pandemi Covid-19. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon izin dengan sangat (*sattabi sappulu*; Bahasa Mandailing) kepada banyak orang yang darinya saya menggali inspirasi. Ada banyak, beberapa nama berikut yang saya ingat. Kalau ada peran penting lain yang terlewat, saya mohon maaf.

Hendro Sangkoyo yang membagi banyak informasi soal SARS-CoV-2, baik melalui diskusi-diskusi *on-line* maupun melalui kiriman-kiriman publikasi terbaru soal virus itu dan Covid-19. Noer Fauzi Rachman yang menjadi teman diskusi soal kapitalisme dan terus-menerus mengumpan dengan bahan-bahan bacaan soal kapitalisme, baik sebelum, dan di masa Covid-19. Terima kasih juga kepada Muhammad Reza Sahib yang menjadi teman ngobrol *on-line* soal situasi nasional.

Berikutnya adalah kawan-kawan yang menjadi teman diskusi di Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah yang sangat membantu saya untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Pada dasarnya semua mereka yang terlibat di KOBAR sangat membantu, namun beberapa orang berikut menjadi teman diskusi yang intens. Mereka adalah Cipta, Cornel, Nila, Mila, Nico, Seniman, dan Herdin.

Terima kasih secara spesifik kepada Wakgeng yang biasanya secara serius menjadi pembaca awal dari tulisan-tulisan saya soal Covid-19 dan memberikan masukan sebelum tulisan-tulisan itu dipublikasikan. Untuk masukan mereka pada tulisan-tulisan tertentu, saya mengucapkan terima kasih kepada Mokh Sobirin untuk masukannya pada tulisan "*Kapitalisme Model Ganda untuk Memahami Covid-19*". In'am, Sukron, Bagas, dan Umi, untuk diskusi yang mendalam soal substansi pada tulisan "*Solidaritas Produsen-Konsumen di Masa Covid-19*". Para komentator terhadap tulisan "*Revolusi Covid-19*" sehingga melahirkan tulisan "*"Revolusi Covid-19": Konfirmasi*". Gugun Muhammad yang telah menyetujui wawancara dengannya (dan dengan Sekjen Komunitas Anak Kali Ciliwung) menjadi bagian dari penerbitan ini.

Kepada para pengelola laman mojok.co, langgar.co, literacyaccessonline.com, dan literasimedium.com, dimana beberapa tulisan atau bagian dari tulisan yang ada dalam buku ini muncul pertama kali, untuk izin mereka terhadap proses memuatnya dalam buku ini.

Hairus Salim dari Penerbit Gading yang langsung mendukung ide penerbitan naskah ini, Dwi Cipta untuk kerja pengeditannya, Yoga untuk bikin disain sampul, dan penataletak dari Penerbit Gading. Semuanya, terima kasih.

Semarang

3 Mei 2020

Revolusi Permanen

Ikhtiar Menemukan Alternatif Terhadap Moda Produksi Kapitalisme[1]

Tulisan ini melihat bahwa penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus korona baru, pandemi Covid-19, pada dasarnya adalah bagian integral dari moda produksi kapitalisme. Covid-19 disebabkan oleh infeksi dari virus SARS-CoV-2 terhadap manusia. Ada kemungkinan bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari binatang.[2] Selama proses transmisi virus dan dampak yang ditimbulkannya, tulisan ini berusaha melihat relasinya dengan moda produksi kapitalisme.

Disepakati atau tidak, dunia kita sekarang ini terhegemoni oleh moda produksi kapitalisme yang salah satu hukum besinya adalah mencari/

---

[1] Tulisan ini pada awalnya dibuat untuk menjadi sikap kolektif. Namun tidak jadi. Draft awal tulisan ini dibuat oleh penulis, dilakukan pengeditan oleh seorang kolega, dan mendapatkan masukan-masukan dari kolega yang lain. Dalam terbitan ini, penutur dalam tulisan diubah dari kolektif "kami" menjadi personal "penulis" atau "saya". Pertama kali beredar di media sosial pada 16 Maret 2020. Sebagian dari tulisan ini sudah diambil untuk menjadi materi pada "*Siaran Pers III Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah Periode 2-4 April 2020 bertajuk "Pandemi Covid-19: Master Kontrol"*".

[2] Artikel yang diacu untuk asal-usul SARS-CoV-2: Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I., Holmes E.C., and Garry, F.R. (2020) The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nat Med* 26, 450–452.

mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Demi tercapainya tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin ini, maka segala hal dilakukan oleh kapitalis, yaitu orang yang diperbudak oleh kapital. Tujuan hidupnya adalah mendapatkan keuntungan dan melakukan akumulasi kapital sebanyak mungkin.

Pandangan hidup ini sudah terinstitusionalisasikan ke dalam negara. Dalam konteks negara, hukum pertumbuhan ekonomi, atau lebih tepatnya suatu cara untuk menyatakan agregasi produksi dalam proses kapitalisme, menjadi diktat yang harus diikuti oleh negara.

Hukum pertumbuhan ekonomi memaksa kapitalisme untuk terus berekspansi. Selama proses ekspansi inilah kapitalisme mengubah ekosistem secara radikal. Hutan dibabat untuk kemudian diekstraksi menjadi berbagai macam komoditas (kayu, mineral, dan hasil hutan lain). Sungai dibendung untuk mengestrak energi dan airnya. Rawa-rawa diurug dan laut ditimbun untuk menciptakan lahan. Manusia dikonsentrasikan dalam suatu ranah spasial yang disebut kota, contohnya terutama kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan Semarang, untuk menekan biaya produksi agar marjin keuntungan dalam sebuah proses produksi kapitalistik menjadi lebih besar. Tempat-tempat yang masih relatif otonom dan berjarak dari sirkuit moda produksi kapitalisme (global) seperti pedesaan di Indonesia, secara paksa dimasukkan ke dalam teritori kapitalisme global, misalnya melalui proses perampasan tanah di

pedesaan, ekstraksi komoditas, dan pasokan buruh murah.

Perubahan-perubahan ekosistem yang radikal tersebut menyebabkan semakin rendahnya tingkat keanekaragaman hayati karena kepunahan berbagai spesies dari muka bumi ini. PBB menyatakan pada awal Millenial ini tercatat kelimpahan rata-rata spesies asli di sebagian besar habitat berbasis daratan telah turun setidaknya 20%, sebagian besar di antaranya terjadi sejak 1900-an. Perubahan-perubahan ekosistem yang radikal juga menyebabkan banyak dari entitas non-manusia kemudian kehilangan habitatnya. Sejak tahun 1940 telah muncul ratusan kuman memasuki ruang-ruang yang baru karena habitat lama mereka telah hancur. Mayoritas dari kuman-kuman ini berasal dari non-manusia seperti binatang. Oleh karena itu menjadi sangat rasional apabila virus bertransmisi dari non-manusia dan menjadikan manusia sebagai sasaran inang berikutnya.

Dengan demikian, di satu sisi, yang berperan besar dalam perubahan-perubahan radikal lingkungan ini adalah para pemodal yang terus mencari keuntungan tanpa akhir. Di Indonesia, ini bisa dilihat dari perubahan masif yang terjadi atas eksosistem hutan karena pembalakan kayu oleh para kapitalis kayu terutama sejak era kolonial sampai sekarang.

Di sisi lain, dampak yang timbul sangatlah timpang. Dampak Covid-19 tidaklah sama terhadap kota-kota di negara kaya seperti Paris, Milan, dan Amsterdam (yang

mana kemajuannya tidak bisa dipisahkan dari proses panjang ekonomi global yang timpang sebelum, selama, dan sesudah kolonialisme) dengan terhadap kota di negara-negara berkembang, katakanlah kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan Semarang. Di kota-kota di negara kaya, infrastruktur (misalnya: rumah sakit, air, sanitasi, transportasi manusia dan barang) tersedia dengan baik. Kalaupun tidak tersedia, pemerintah dapat membangun infrastruktur dalam hitungan hari, seperti yang dilakukan pemerintah China dalam membangun rumah sakit khusus penderita Covid-19. Karena itu pilihan melakukan penutupan teritorial (*lock down*) menjadi masuk akal bagi kota-kota di negara maju.

Di kota-kota di Indonesia, infrastruktur tidak seperti di kota-kota di negara-negara kaya. Air keran tidak dapat langsung diminum. Sanitasi sangat buruk dan tidak terpelihara dengan baik. Fasilitas rumah sakit juga sangat tidak memadai. Berita dokter-dokter di Indonesia yang harus bekerja dengan segala macam keterbatasan peralatan keamanan standar seperti masker dan baju pengaman menunjukkan betapa kontrasnya infrastruktur kesehatan di kota-kota negara berkembang seperti Indonesia dengan kota-kota di negara maju. Banyak warga di kota-kota Indonesia yang tinggal di kampung-kampung kota dengan kepadatan populasi yang tinggi dan dengan putaran perekonomian berbasis jam atau harian. Mempertimbangkan kondisi tersebut, hampir mustahil melakukan karantina-mandiri karena proses perjumpaan dengan orang lain

juga nyaris mustahil dihindari. Bagi sebagian warga di kota-kota di Indonesia, kalau tidak bekerja dalam hitungan jam atau hari, maka tidak ada stok pangan dan barang-barang kebutuhan hidup selama proses karantina-mandiri ataupun penutupan teritorial.

Ini semua menunjukkan bahwa ide penutupan teritorial seperti yang dilakukan oleh kota-kota di negara kaya, menemukan konteks sosial-ekologis yang sangat berbeda di kota-kota Indonesia. Proses ekonomi global yang timpang membuat negara dan kota-kota itu kaya, sementara Indonesia dan kota-kotanya miskin. Mereka kaya, karena Indonesia miskin. Indonesia miskin karena mereka kaya.

Dengan membangun argumentasi seperti itu, bukan berarti penulis tidak menghargai/menghormati semua inisiatif otoritas seperti pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, terutama inistiatif-inisiatif yang masuk akal. Poin yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa momen Covid-19 tidak bisa dilokalisasi, direduksi, dan didepolitisasi di wilayah-wilayah teknis seperti membaca qunut atau berdoa, meminum jahe, mencuci tangan, memakai masker, meliburkan sekolah, menutup ruang-ruang publik seperti museum, membatalkan agenda kapitalis seperti lomba balap, memperbolehkan pegawai negeri bekerja dari rumah, mengurangi frekuensi transportasi publik, karantina-mandiri, membangun tempat cuci tangan umum, menutup teritorial, bantuan dan pinjaman dari negara kaya atau institusi finansial dunia kepada

negara miskin, dan berbagai intervensi teknis lainnya. Sementara, pemerintah Indonesia, seperti juga halnya pemerintah-pemerintah di berbagai negara lain di dunia, badan-badan dunia seperti WHO, dan korporasi-korporasi besar tidak membawa diskusi lebih mendalam melihat akar persoalan.

Dengan pemahaman seperti ini, terlihat sangat kontradiktif ketika misalnya di satu sisi pemerintah Indonesia berusaha menanggulangi Covid-19, sementara di sisi lain berusaha pula menggolkan Omnibus Law untuk memperlancar investasi (kapital).

Melalui uraian politik ini, penulis melihat bahwa kasus Covid-19 ini juga penting untuk diperbincangkan seluas-luasnya oleh publik secara kritis. Covid-19 hanyalah gejala/*symptom* dari satu penyakit global yang dalam hemat penulis sudah sangat parah, yaitu moda produksi kapitalisme. Membincangkan Covid-19 tanpa membincangkan bagaimana ia muncul atau diproduksi, dampaknya yang timpang, dan hubungannya dengan moda produksi kapitalisme, saya anggap sebagai narasi kaum kapitalis nasional/global yang tidak ingin dosanya diketahui publik.

Uraian ini adalah ajakan untuk memulai sebuah proyek “intelektual” dan “praktis” (digabung menjadi: praksis) secara luas untuk membangun utopia akan sebuah habitat dunia yang lebih adil. Ajakan pada praksis untuk terus-menerus mencari alternatif terhadap moda produksi kapitalisme. Covid-19 cuma satu titik dari totalitas moda produksi kapitalisme.

Mereduksi perbicangan ke masalah teknis berarti tidak menyasar akar permasalahan secara mendasar. Karena itu, solusi permanen yang layak dikerjakan adalah sebuah “revolusi permanen,” yaitu menjadikan momen Covid-19 sebagai sebuah bukaan sosial-ekologis untuk memicu proses perubahan permanen, bergerak meninggalkan moda produksi kapitalisme.

Dalam menggarap “revolusi permanen” penulis melihat bahwa untuk meliquidasi moda produksi kapitalisme, hal filosofis yang dapat dijadikan pegangan adalah mendorong agar nilai-pakai/guna, menggeser nilai-tukar/jual yang menjadi tulang punggung kapitalisme, menjadi sumbu utama yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia dan non-manusia, demi tercapainya suatu tatanan yang berkeadilan bagi semua.

Beberapa contoh yang dapat di anggap sebagai praksis menuju revolusi permanen, misalnya: (1) Kalau menganjurkan karantina-mandiri atau penutupan teritorial, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran negara untuk kebutuhan pokok dan dasar harian rakyat yang miskin, yang paling terdampak langsung oleh karantina dan penutupan; dan (2) Membatalkan Omnibus Law yang pada intinya merupakan satu instrumen untuk memudahkan ekspansi kapital (dan dengan demikian menambah risiko penyakit).

Revolusi COVID-19[3]

Dalam tulisan bertajuk "*Anti-Capitalist Politics in the Time of Covid-19*" yang dimuat di laman Jacobin, geografer David Harvey membayangkan pandemi Covid-19 bisa memicu "*riot and revolution*". Dalam kesempatan ini, saya berusaha memahami detak jantung Planet ini secara lebih dekat tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Berbeda dengan Harvey, saya sampai pada titik bahwa revolusi bukan lagi akan terjadi, tapi sedang berlangsung.

Dalam sebuah kesempatan, sosiolog Bruno Latour menyebutkan bahwa "*Any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor—or, if it has no figuration yet, an actant*"[4]. Hanya yang membuat perbedaan yang dapat dihitung sebagai aktor. *Actant* dalam tulisan-tulisan Latour kita kenal sebagai aktor non-manusia. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat intens dimana kita berhadapan dengan *actant* yang bahkan tak bisa kita lihat dengan mata biasa. Dia bernama *"Severe acute respiratory syndrome*

---

[3] Pertama kali dimuat pada dinding *facebook* penulis pada 26 Maret 2020, setelah itu beberapa laman *on-line* memuatnya kembali.

[4] Apa pun yang mengubah keadaan dengan membuat perbedaan adalah aktor — atau, jika belum ada figurasinya, bisa disebut *actant*.

coronavirus 2" (SARS-CoV-2) yang kemudian akrab disebut sebagai virus corona. Virus ini telah mengocok ulang kekuasaan di level dunia melalui penyakit yang ditimbulkan, yang akrab disebut dengan *Coronavirus diseases 2019* (Covid-19).

Saya melihat momen ini sebagai momen revolusi. Sebuah perubahan spontan-organik, radikal, dan cepat. Ini bukanlah sebuah revolusi Marxis dimana elan revolusioner yang dibayangkan adalah kaum buruh. Ini adalah sebuah revolusi ekologi/lingkungan abad XXI dimana elan revolusinernya adalah non-manusia. Dari beberapa tulisan kontemporer yang terbit sejak meledaknya pandemi bernama Covid-19 ini, saya sampai pada satu titik pemikiran bahwa pada dasarnya virus corona ini adalah buah dari relasi antara manusia dengan non-manusia. Saya tidak ingin menyebut yang terakhir sebagai "alam," karena saya memahami manusia sebagai bagian yang integral dari apa yang disebut sebagai "alam" itu.

Pendek cerita, dalam salah satu versi pendapat, virus corona muncul karena ruang hidup atau habitatnya terdesak dan karena itu manusia menjadi sasaran berikutnya untuk dijadikan inang. Poin soal asal-usul virus corona ini belum konklusif. Sebuah penjelasan lain yang masuk lebih detil dan eksplisit dari tulisan yang pernah saya baca juga rasanya sangat masuk akal. Bahwa banyak patogen (bakteri, virus, atau mikroorganisme lain penyebab penyakit) yang tadinya berada dalam habitatnya di hutan, kini bergerak

meninggalkan hutan karena hutannya sudah semakin habis. Patogen-patogen itu mencari inang-inang yang baru. Dan manusia, hanyalah satu spesies yang menjadi sasaran mereka di dalam universal yang disebut sebagai alam itu.

Revolusi non-manusia bukanlah barang baru. Contoh revolusi ekologi yang radikal misalnya, pernah terjadi di Danau Victoria, Afrika, ketika spesies Ikan Kakap (*Lates niloticus*) dari Sungai Nil dimasukkan oleh manusia ke dalam Danau Victoria dengan tujuan meningkatkan produktivitas daging ikan demi menutupi permintaan dari, terutama, pasar Eropa. Ternyata di sana ia menjadi spesies asing (*alien species*). Begitu dia masuk, maka rantai makanan segera diubah. Perubahan radikal terjadi pada rantai makanan karena Ikan Kakap memangsa ikan pemangsa Alga. Alga kehilangan predator dan populasinya meledak. Kondisi populasi Alga yang semakin besar (*Algae bloom*) membuat Danau berubah menjadi danau beracun. Ia beracun karena Alga yang populasinya meledak memiliki kandungan *microcystin* yang beracun bagi hati manusia yang mengkonsumsinya. *Microcystin* ini bisa terbawa lewat air.

Revolusi Covid-19 berlangsung sangat spontan-organik. Bayangkan, dari sudut pandang virus corona semuanya ini adalah soal eksistensi spesies mereka: ini soal bagaimana mereka memperbanyak diri. Soal hidup atau mati. Suatu gerakan yang sangat progresif-revolusioner! Namanya spesies, harus hidup dan

berbiak. Itu proses organik. Namun, dari sudut pandang inang seperti manusia, ini adalah penyakit. Begitu cerdik, virus ini memilih tempat yang sangat lunak untuk menjadi basis spasial pengorganisasiannya: di paru-paru inangnya. Mereka berdiam dan memperbanyak diri di sana.

Revolusi Covid-19 juga radikal dan cepat. Di bidang politik, ia sangat radikal kalau kita lihat bagaimana konjungtur geopolitik global dikocok ulang karena kehadirannya. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang sebelum pandemi adalah negara-negara kaya dunia pertama yang sangat kuat di segala lini, tiba-tiba terlihat berubah menjadi pariah didera oleh wabah Covid-19. Tentu saja ada ketimpangan dalam bagaimana cara negara kaya macam negara-negara Eropa Barat menanggapi wabah Covid-19 dengan cara negara miskin seperti Indonesia. Tulisan ini tidak akan masuk membahas itu karena sudah didiskusikan dalam tulisan bertajuk "*Revolusi Permanen: Ikhtiar Menemukan Alternatif Terhadap Moda Produksi Kapitalisme".*

Di sisi lain, kekuatan geopolitik lain seperti China dan Kuba menjadi terlihat begitu jagoan. Sampai saat ini, dunia melihat China berhasil menghadapi ledakan pandemi Covid-19. China seolah lulus menjalani ujian untuk menjadi pusat dari kapitalisme global berikutnya, setelah AS yang kini masih bertarung menyelamatkan warganya dari ledakan populasi SARS-CoV-2. Kuba, negara kecil itu, menjadi jagoan karena media, terutama media sosial kita, memperlihatkan bagaimana negara

itu mengirim dokter-dokternya untuk membantu negara-negara yang sedang kena serangan wabah. Selain itu, para ilmuwan Kuba juga diberitakan sudah memproduksi Interferon yang disebut-sebut dapat meningkatkan kekebalan tubuh untuk menghadapi serangan dari virus macam SAR-CoV-2.

Di tingkat nasional, kocok ulang kekuasaan politik belum terjadi hingga saat ini. Namun sudah terlihat bagaimana wibawa pemerintah pusat semakin berkurang. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi yang pada awalnya tidak begitu menghiraukan pandemi korona, harus membayar mahal untuk itu.

Mari kita runut proses rontoknya wibawa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sejak kasus Covid-19 memasuki Indonesia. Pada sekitar akhir Februari 2020, terbaca di berita bahwa pemerintah mengumumkan akan memberikan insentif bagi pemengaruh (*influencer*) asing sebanyak 72 miliar Rupiah. Dana insentif itu ditujukan untuk satu hal: menggaet wisatawan, yang tentu saja ujungnya adalah meningkatkan pemasukan. Alih-alih menutup pintu masuk ke Indonesia seperti bandara untuk mencegah masuknya virus corona seperti yang dilakukan negara-negara lain, pemerintah malah mengundang wisatawan agar berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Menteri-menteri Jokowi pada waktu-waktu itu terlihat masih menganggap enteng revolusioner non-manusia ini. Berbagai pernyataan muncul tentang penangkal Covid-19, mulai dari do'a, empon-

empon, rempah-rempah, hingga sayur lodeh. Seiring berjalannya waktu, terbukti tak ada satu pun dari penangkal Covid-19 tersebut yang secara meyakinkan dapat mencegah pertumbuhan populasi virus ini. Pada masa-masa awal persebaran wabah Covid-19 ini, ide mengenai re-alokasi APBN untuk penanganan Covid-19 terlihat tidak mungkin.

Pada akhir Maret 2020, situasi politik sudah berubah. Nyaris 180 derajat. Atau, kalau sebelumnya mengarah ke utara, kini menghadap ke selatan. Re-alokasi APBN sekarang adalah langkah yang disuarakan banyak elit dan tampaknya akan diambil pemerintah. Secara politik, kewibawaan pemerintah pusat sudah semakin tergerus. Media sosial penuh dengan berbagai jejak digital Jokowi dan menteri-menterinya yang sekitar satu bulan sebelumnya menganggap sepele virus corona. Bahkan kadang-kadang yang dibagikan warganet bukan hanya tautan, tapi tangkapan layar yang mengandung judul berita dimana terbaca pemerintah meremehkan virus corona. Dan bukan cuma 2 atau 3, kadang-kadang 6 tangkapan layar berita sekaligus, digabung menjadi satu.

Pemerintah daerah seperti Kota Tegal, sudah tidak peduli dengan pemerintah level di atasnya. Pada tanggal 23 Maret 2020, Pemerintah Kota Tegal menyatakan *local lockdown* terhadap Kota Tegal. Sehari setelahnya, pada 24 Maret 2020, terbaca di media Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi proses *local lockdown* ini dengan menyebutkan bahwa “*belum ada*

cerita lockdown". Namun, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono terus melaju. Pada 26 Maret 2020, di media kembali terbaca dia mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa di Tegal diberlakukan *local lockdown*.

Hal yang sama terjadi dengan pemerintah Provinsi Papua yang terlihat juga sudah tidak mempedulikan pemerintah pusat yang menginginkan adanya satu proses pengambilan kebijakan yang tersentral di Jakarta. Pemprov Papua menutup Bandara Sentai Jayapura untuk penerbangan penumpang terhitung sejak 26 Maret 2020. Tujuannya adalah mencegah aliran orang—yang tentu saja akan memperbesar peluang mengalirnya juga virus corona—ke Papua melalui bandara itu. Pemerintah pusat tidak setuju. Hal ini misalnya terlihat dari berita di media daring yang menyebutkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang tidak menyetujuinya. Kasus Tegal dan Papua ini adalah material empiris yang memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat sudah berkurang wibawa politiknya.

Di bidang ekonomi, perubahan tak kalah radikal. Pada minggu kedua Maret 2020, sebagai contoh, orang terkaya di Dunia, Jeff Bezos, pemilik laman toko *on-line* raksasa, Amazon, mengalami kehilangan kekayaan sebesar lebih dari 100 triliun Rupiah dalam semalam karena harga saham Amazon turun.

Di dalam negeri, hal yang sama juga terjadi. Pabrik-pabrik dengan bahan baku dari, dan yang memasarkan

produknya ke, China, terbaca sudah terancam bangkrut pada awal Maret 2020. Yang lebih fenomenal sekaligus misterius barangkali adalah proyek pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan infrastruktur adalah jantung dari pemerintahan Jokowi. Ia berfungsi memompakan kapital ke berbagai daerah. Fenomenal karena proyek ini juga dihentikan pada awal Maret 2020. Pada 1 Maret, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu menyebabkan banjir, misalnya, pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Namun, penting dicatat, pada tanggal 25 Februari, di media terlihat menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terhalang oleh virus corona karena mobilitas pekerja dan pasokan bahan baku macet dari China yang pada saat itu sedang berjuang menghadapi virus corona. Jadi, bagi orang seperti saya penghentian ini tetaplah sebuah misteri. Apakah ia dihentikan karena pasokan pekerja dan barang yang terhambat dari China karena pandemi Covid-19, ataukah karena ia menyebabkan banjir?

Lebih detil, menjelang akhir Maret, di media terbaca bahwa sebagian besar toko di beberapa mall di Jabodetabek seperti, Summarecon Mall di Bekasi, Plaza Indonesia, Lippo Mall Puri, Senayan City, dan Central Park, tutup untuk meminimalisasi penyebaran virus corona.

Di Semarang, kedai-kedai kopi pun mulai tutup. Kedai Kopi Kang Putu, misalnya, sudah tutup sejak pertengahan Maret 2020. Bagi yang tidak tutup, maka omzetnya menurun drastis. Pada akhir Maret 2020, seorang pekerja di Café di kawasan Tembalang menyatakan pada saya bahwa Café mereka mengalami penurunan omzet sampai 87% sejak beberapa hari terakhir.

Di ranah kebudayaan, perubahan radikal sudah sampai sangat personal. Mendengar orang batuk sedikit, kita atau kawan lain langsung menyeletuk: corona?! Atau kalau tidak, diam-diam masing-masing berfikir, wah jangan-jangan si anu kena corona, aku bisa tertular! Secara periodik, tiba-tiba kita menjadi rajin cuci tangan dengan sabun, ganti baju dan merendamnya dengan deterjen, dan mandi. Semuanya untuk membersihkan badan kita dari virus corona.

Persentuhan antar orang seperti bersalaman otomatis menjadi tak boleh. Kebiasaan berkumpul-kumpul seperti mengaji atau nongkrong di kafe-kafe ditiadakan dulu. Seorang kawan saya yang berencana menikah beberapa bulan ke depan, suatu ketika bercerita soal itu dan terlihat galau dengan berbagai ketidakpastian soal waktu pernikahannya.

Pemerintah provinsi macam Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah sudah menyarankan agar warga tidak pulang kampung, baik dari Jakarta maupun dari Semarang. Karena dikhawatirkan seseorang yang pulang ke kampung membawa serta virus corona

dalam dirinya dan menularkannya pada orang lain, terutama orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti orang berusia lanjut. Kelompok aktivis masyarakat adat di media sosial bahkan sudah memutar ide me-*lockdown* komunitas-komunitas adat agar orang luar tidak masuk. Dari seorang kawan di hulu Waduk Sempor, Jawa Tengah, saya mendapatkan kabar bahwa Koramil setempat menganjurkan setiap orang yang baru datang dari rantau untuk memeriksakan kesehatannya. Dalam pesan melalui *whatsapp* yang beredar di group-group warga di Semarang, Gubernur Jawa Tengah juga memberikan perhatian pada angka pulang kampung perantau yang mengalir dari Jabodetabek ke berbagai daerah di Jawa Tengah.

Di tengah-tengah revolusi yang sedang berlangsung, spesies manusia dipaksa untuk memikirkan eksistensinya. Bagi negara dengan pelayanan kesehatan yang jelek seperti Indonesia, hal-hal bobrok itu tersingkap. Bahkan para *influencer*, di bawah pengaruh Covid-19, tidak diberi ruang untuk menuntupi kebobrokan itu. Mana sistem yang bagus dan bobrok dengan telanjang terlihat.

Perbincangan Covid-19 hari-hari belakangan ini sudah semakin berkembang. Selain memikirkan dan mencari cara agar populasi dan persebaran virus corona ini tidak semakin naik dan meluas, perbincangannya juga sudah mulai menyentuh ketahanan pangan. Ini terutama terjadi, dugaan saya, karena rakyat melihat bahwa pemerintah cenderung tidak punya model/arah

yang jelas dalam menghadapi Covid-19. Kelompok-kelompok rakyat miskin seperti di Jakarta sudah mulai memobilisasi bantuan dari publik untuk membantu kebutuhan kaum miskin kota. Hal yang sama saya lihat terjadi di Yogyakarta. Berbagai kelompok masyarakat sudah mengambil inisiatif memobilisasi ketersediaan bahan makanan melalui dapur umum. Di group-group *whatsapp* sudah beredar langkah-langkah aplikatif bagi kelompok masyarakat sipil untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Idenya sangat beragam, mulai dari menghidupkan lumbung-lumbung makanan di kampung-kampung, hingga pertanian perkotaan gaya Havana, Kuba, ketika negara itu diembargo oleh negara-negara blok kapitalis macam Amerika Serikat.

Pertanyaan besar sekarang menantang eksistensi manusia—namun secara berbeda/timpang. Kemana Revolusi Covid-19 ini akan membawa kita? Apakah sebagai individu kita akan mampu selamat melewati zaman pandemi ini? Berikutnya, apakah kelompok kapitalis yang berperan besar dalam memproduksi pandemi melalui aktivitasnya yang mendegradasi ekosistem seperti hutan-hutan yang sebelumnya menjadi rumah patogen akan mampu melakukan penyembuhan diri dan kembali mengisi dunia pasca-Covid-19 dengan aktivitas yang sama, yaitu mengakumulasikan kapital? Apakah kelompok-kelompok miskin yang menderita paling besar dari kasus pandemi ini mampu melakukan agregasi aksi politik untuk membidik perubahan, misalnya kocok-ulang elit

yang berkuasa atau perubahan yang lebih struktural di berbagai bidang, misalnya, peningkatan kualitas penjagaan kelestarian lingkungan ataupun peningkatan pelayanan kesehatan? Apakah negara sebagai kerangka kepengaturan masih bisa dipertahankan oleh elitnya, ataukah ia akan runtuh?

Dalam hemat saya, ini semua tergantung pada imajinasi politik seperti apa yang kita miliki dalam mengatur kehidupan bersama di Planet ini, *wabilkhusus* di Pulau Jawa yang padat. Aktivitas-aktivitas solidaritas non-negara, tampaknya, adalah bibit-bibit suatu perubahan radikal yang akan terus berkembang, dan tak mungkin dilepaskan dari dinamika populasi dan persebaran virus corona. Semuanya bisa dilihat sebagai kaki-kaki dari kelompok-kelompok terkait dalam usahanya mempertahankan hal yang sangat mendasar: eksistensi diri dan kelompoknya. Saya melihat semuanya berada dalam satu derap langkah yang sama, menuju apa yang dalam kesempatan sebelumnya saya sebut sebagai Revolusi Permanen!

“Revolusi COVID-19”: Konfirmasi[5]

Tulisan ini adalah tanggapan atas berbagai pertanyaan yang muncul terhadap tulisan saya yang bertajuk “Revolusi Covid-19”. Komentar ini umumnya muncul di sosial media. Kalau saya tidak memiliki akses ke media sosial terkait, misalnya group *whatsapp*, dengan berbagai cara komentar-komentar itu sampai pada saya. Saya menanggapi komentar-komentar itu dengan positif, dalam arti, tulisan itu dibaca. Berikut ini saya coba sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menjawabnya satu-satu.

Pertanyaan-pertanyaan saya ambil sendiri dari pesan, dan dengan demikian, sangat bisa terjadi kesalahan dalam bagaimana saya memformulasikan ulang pertanyaan tersebut. Siapapun penanya yang merasa terjadi kesalahan dalam usaha saya memformulasikan ulang pertanyaan, sampaikan saja. Kepada beberapa pemilik komentar, saya sudah minta izin untuk menyalin pertanyaannya dan menjadikannya sebagai bagian dari tanggapan ini, meskipun namanya tidak saya sampaikan. Ada banyak pemilik komentar yang memang saya tidak minta izin secara langsung/

[5] Dimuat pertama kali pada 31 Maret 2020 di: https://langgar.co/revolusi-covid-19-konfirmasi/?fbclid=IwAR2PXW6XZPh1FaUSsn1f7nD84RY9dvgYlBIa7N2uK0jNUomWOMuOh3apu2k.

personal, namun karena komentar-komentar mereka muncul di media sosial, saya anggap izin melalui komunikasi personal itu tidak terlalu dibutuhkan. Kalau ada yang keberatan karena komentarnya muncul dalam bentuk tanya jawab ini, silakan kontak penulis secara langsung. Di atas semua itu, saya minta maaf karena tulisan itu ternyata jelek dan menimbulkan banyak pertanyaan.

Berikut ini saya sampaikan dalam komentar-komentar tersebut dalam bentuk poin/tema komentar, komentar yang muncul, dan jawaban saya.

Tentang *name-dropping*

Komen (K): *Name dropping* (bawa-bawa nama Latour dan Harvey)

Jawab (J): Saya memahamai *name-dropping* sebagai tindakan membawa nama orang terkenal untuk membuat diri pelakunya terlihat mengesankan. Saya tidak *name-dropping*. Saya punya kritik dan kebutuhan menyebut nama Harvey dan Latour. Harvey saya kritik. Dan bagi saya poin kritiknya substansial. Harvey melihat kondisi sekarang akan membawa ke situasi "*riot dan revolution*". Atau dia melihat revolusi akan terjadi. Saya melihatnya revolusi sudah terjadi. Apakah itu tidak cukup substansial? Substansial dalam arti menempatkan tulisan saya dalam dunia diskusi Covid-19 yang sedang berlangsung, sekaligus menawarkan cara baru melihat dunia kita sekarang. Dan saya jelaskan dalam tulisan itu

kenapa saya menganggap sudah terjadi revolusi.

Rasanya ada hal yang sangat mendasar di sini, yaitu masalah politik ontologi (*political ontology*). Harvey kemungkinan tinggal dan menulis di negara kaya (Amerika Serikat), sementara saya tinggal dan menulis di negara miskin (Indonesia). Jadi ada kemungkinan intensitas dan kompleksitas permasalahan yang saya lihat atau rasakan lebih intens dan kompleks dibandingkan dengan apa yang dilihat atau dirasakan Harvey.

Latour; saya membutuhkan dia untuk menjelaskan bahwa non-manusia juga adalah bisa menjadi aktor perubahan. Dalam kasus ini yang menjadi *actant* adalah SARS-CoV-2.

Apakah revolusi sedang terjadi?

K1: Naif kalau menyimpulkan revolusi sedang terjadi. Virus mengganggu *supply chain* tapi terus apa? Yang kerja di Purwakarta masih jalan terus. Industri-industri otomotif yang sempat tutup di Jepang sudah siap-siap mau kerja lagi. Aktivitas penambangan dan pembabatan hutan masih terus berlanjut.

K2: Virus sudah berkali-kali terjadi sebelum Covid-19 tahun 2020. Ada juga yang jauh lebih pandemik dan menimbulkan banyak korban jiwa, tapi karena “kontradiksi subjektif” belum memadai, tidak menghasilkan revolusi.

K3: Virus tidak bisa jadi agensi perubahan sosial.

Tidak ada prasyaratnya. Karena ia tidak punya kesadaran kelas. Tidak bisa diajak mengorganisasi *class struggle*. Ia memukul secara sporadis. Ke kiri dan ke kanan. Pasca wabah kita bisa makin progresif, bisa pula terjatuh makin terpuruk. Melahirkan pemerintahan yang totaliter. Bahwa virus telah mengocok ulang semua itu iya. Tapi pendulumnya tidak jelas. Ke kiri apa ke kanan. Ia membuat perubahan mendadak iya. Menjungkirbalikkan konfigurasi kekuasan global iya. Tapi itu belum menjadi pertanda kemenangan kelas pekerja dan kelangsungan ekologi. Jadi meletakkan wabah pada dirinya sebagai agen perubahan menuju tatanan yang lebih baik itu terlalu dini. Semua tergantung kesiapan gerakan rakyat melihat situasi krisis kapitalisme pasca-wabah. Kalo gerakan kita terorganisasi dengan baik ada kemungkinan kehidupan kita bisa bergerak ke arah lebih baik. Kalo tidak terjadi bisa saja terjadi kerusuhan atau bangkitnya rezim ketertiban militeristik.

K4: Menarik, tapi saya tidak sepakat kalau Covid-19 ini disebut revolusioner dan progresif pada dirinya sendiri. Bahwa perjangkitan ini bikin sistem yang mengorkestrasi hidup kita jadi lemah dan mengocok ulang kekuasaan itu satu hal. Tapi kocokan ulang itu belum tentu revolusiner. Kita bisa saja jadi lebih feodal atau fasis setelah pandemi ini berlalu. Kelompok kanan juga merayakan Covid-19 ini soalnya.

J: Kita mendiskusikan revolusi yang berbeda. Revolusi yang saya diskusikan di tulisan itu bukan

revolusi yang kawan-kawan diskusikan. Yang saya diskusikan adalah revolusi dari virus, oleh virus, untuk virus. Jadi manusia mati, nasib manusia tidak berubah, atau yang miskin tambah miskin, ya memang begitu. Kalau mau memperbaiki manusia, kelas sosial dan seterusnya, manusia harus bikin revolusinya sendiri, atau mencari cara supaya revolusi virus jadi "bukaan" untuk memperbaiki manusia, atau dengan kata lain membajak revolusi yang telah dibuka oleh virus. Dan soal dulu ada pandemik banyak dan tak kalah seram, ya. Dan orang dulu tak menyebutnya revolusi. Saya memutuskan memberi nama era kita dengan "Revolusi Covid-19". Itu bedanya.

Modal yang ambruk

K: Modal tidak ambruk. Ini aja udah *recovery* kecil-kecilan. Harga emas naik, migas tidak terganggu, tapi untuk di bursa efek memang berpengaruh khususnya *currency* nilai mata uang juga.

J: Tidak ada dalam tulisan "Revolusi Covid-19" saya sebut modal ambruk.

Tentang Teori Konspirasi

K: Penggemar teori konspirasi. Semacam *lubricant* untuk masturbasi intelektual

J: Iya. Lebih tepatnya saya melihat diri saya sebagai "konstruksionis"

Tawaran

K1: Tawarannya masih terlalu simpel dan kabur.

J: Tawarannya "revolusi permanen" (frase terakhir dalam tulisan "*Revolusi Covid-19*"). Apa itu? Utopianya: menggunakan nilai-guna dan menggeser nilai-tukar sebagai cara mengatur kehidupan bersama (manusia dan non-manusia).

Metabolic Rift (MR)

K: Justru yang bisa dibaca dari tulisan itu yakni, dalam masyarakat kapitalisme, retaknya metabolisme alam, memicu krisis, bahkan pertumbuhan mencapai limitnya. Tapi, mereka selalu bisa pulih, mereorganisasi ulang lagi dan lagi, alias bernegasi.

J: Boleh juga. Saya mengikuti teori *Metabolic Rift* yang didorong oleh Bellamy Foster dkk. Tapi, teori *Metabolic Rift* menurutku sudah tumbang kalau kita baca kritik-kritik Jason Moore. Dan menurut saya semua kritik Jason Moore terhadap teori *Metabolic Rift* masuk akal. Topik ini sebenarnya di luar tema, tapi yang saya anggap relevan tentu saya jawab karena yang saya lihat ini adalah debat canggih dalam teori tentang kapitalisme kontemporer.

Revolusi

K: Kondisi ini mungkin bisa dipertautkan di ranah kontekstual rill proletar atau peasant (petani kecil)—apakah percik-percik itu nampak? Atau stagnan, itu sih kalau saya memandang revolusi.

J: Kalau dalam tulisan "Revolusi Covid-19" saya melihat revolusi sebagai "Sebuah perubahan spontan-organik, radikal, dan cepat." Teori revolusi model ini saya temukan dalam teks anarkisme (misalnya: buku-buku Bookchin) ketimbang Marxis (misalnya: Trotsky).

Multispecies ethnography

K: Dalam etnografi berkembang pendekatan *multispecies ethnography*.

J: Ya itulah. Meski saya bukan pemuja Latour, dan juga bukan pemuja Marx, Harvey, Bookchin, Trotsky, Moore, dst. Saya ambil mana yang berguna untuk hidup saya. Salah satu kritik yang menurut saya sangat relevan terhadap *Actor Network Theory* (ANT) adalah kritik dari Rebecca Lave, bahwa ANT yang cenderung "*structureless*," membuat dia sangat mudah kompatibel dengan Neoliberalisme, karena tidak ada struktur yang mau ditumbangkan. Makanya saya tidak berlama-lama dengan ANT. Tapi saya butuh Latour untuk menjelaskan apa yang ada dalam kepala saya tentang kondisi kita sekarang.

Negasi terhadap revolusi proletariat

K: Negasinya atas potensi revolusi proletariat seperti diajukan Marxisme terlalu simpel. Bosman Batubara tidak melihat kait-kelindan secara dialektis antara revolusi agen biologis virus ini dengan revolusi agen manusia yang anti-kapitalistik.

J: Saya melihat poin ini relevan dengan tulisan saya,

dan menurut saya ini komen yang paling nyambung sekaligus berbobot. (Maap, ini sudah pasti subjektif). Meski tidak yakin apakah yang saya tangkap sesuai dengan maksud pengkritik, saya bisa melihat kaitan itu dengan jelas dalam kepala saya, meski tidak keluar dalam tulisan. Misalnya dengan menyebutkan SARS-CoV-2 adalah produk kapitalisme (i.e. karena hutan-hutan ditebang). Namun jawaban saya kira-kira, Revolusi Covid-19 yang saya maksud memang bukan revolusi Marxis. Tidak ada partai, kepemimpinan, dan seterusnya. Setidaknya itu yang saya bayangkan dari Revolusi Covid-19 milik SARS-CoV-2 ini. Kalau saya sambungkan secara "metabolisme" (revolusi biologis dan manusia agen anti-kapitalisme), maka akan ada tuntutan untuk juga menyambungkan secara praksis revolusi (partai vs. non-partai, terpimpin vs. organik); dan itu tidak mudah (saya tidak/belum sanggup). Makanya saya lari ke revolusi anarkis (organik, spontan) saja. Dan rasanya memang aksi revolusioner SARS-CoV-2 lebih cocok dengan sudut pandang Anarkis daripada Marxis. Dan dengan sendirinya, tidak ada kewajiban bagi saya, setidaknya dalam tulisan itu, untuk bertaut dengan diskusi soal revolusi proletariat, dengan cara menuliskan eksplisit bahwa saya tidak sedang menulis soal revolusi proletariat (yang saya sebut revolusi Marxis).

Kenapa memilih kata "revolusi" bukan misalnya "krisis" untuk mendefinisikan kondisi sekarang? Saya melihat kata "krisis" sudah jenuh, jadi "*new normal*".

Sudah tidak ada efeknya.

Agensi Perubahan

K: tawaran agensi yang diajukan masih kabur. Belum sampai mengajukan hipotesis siapa yang seharusnya memegang kendali di tengah kelumpuhan sistem oleh pandemi ini. Sebagai kontra atas oligarki dunia maupun nasional. Kaum miskin kota? Netizen? Dan seterusnya? Apa kita bisa bayangkan virus sebagai agen anti-kapitalisme baru?

J: Kalau mau dilanjut ke Revolusi Permanen, dalam tulisan "Revolusi COVID-19" di alinea kedua dari akhir, ada agensi yang ditawarkan: "kelompok-kelompok miskin yang menderita paling besar dari kasus pandemi ini".

Industri Integral: Arah co-produksi ruang sejak Coivd-19[6]

Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan: *model industrialisasi seperti apakah yang dapat disodorkan untuk memancing percakapan dalam usaha merumuskan industri, kota, dan kehidupan sejak masa pandemi Covid-19 ke depan*? Saya melihat industrialisasi sebagai proses produksi ruang. Dalam proses produksi ruang di bawah kapitalisme, keputusan tentang ruang seperti apa yang akan diproduksi sepenuhnya didikte oleh kepentingan kapitalis. Istilah "co-produksi" mengacu pada proses bagaimana ruang diproduksi bukan dengan mengabdi pada kepentingan kapitalis, tapi pada kepentingan semua. Bagian pertama tulisan ini berusaha "merekontekstualisasikan" pertanyaan tersebut. Benar bahwa buruh dieksploitasi dan non-buruh diapropriasi dalam model industri kapitalis, atau model yang eksis dan dominan sekarang. Momen Covid-19 membuka ruang untuk rekontekstualisasi persoalan-persoalan industri menjadi lebih vital. Bagian kedua menjawab pertanyaan itu dengan menampilkan

[6] Dimuat pada 25 April 2020 di: https://literacyaccessonline.com/industri-integral-arah-co-produksi-ruang-sejak-covid-19/?fbclid=IwAR1xUPpkNCoT1MLJTGmhimbbl64kM0DPKuY8PbpMod24DALgEGYRopNxKl8.

satu model hipotetis bernama “industri integral”.

Sebagai penulis, saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada ASM yang melalui sebuah obrolan beberapa tahun lalu, dengan dia sadari atau tidak, telah membantu pertanyaan tersebut mengambil bentuk dalam kepala saya. Selanjutnya, beberapa orang kawan di Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) dimana saya bergulat di Zaman Covid-19, serta detil-detil perubahan ritme kehidupan yang terekam dalam *platform on-line* KOBAR, dan juga beberapa *webinar* yang saya ikuti belakangan ini, sangat membantu saya secara pelan-pelan mengasah ketajaman pemikiran ini. Secara *on-line*, substansi tulisan ini pertama kali dipercakapkan dalam acara “*Diskusi Hari Bumi dengan tajuk ‘Bumi, Perubahan Iklim dan Krisis Ruang Hidup di Tengah Pandemi*’” yang diorganisir oleh Simpul Advokasi Rakyat, Kalimantan Timur. Jujur, saya merasa gamang menulis tema ini. Ini bukan sebuah tema yang saya benar-benar geluti. Menganyam tulisan ini juga sekaligus proses belajar bagi saya. Karena itu, alih-alih melihatnya sebagai sebuah proposal final, saya justru melihat model hipotetis ini lebih pada sebagai upaya menghidupkan/memulai/memancing percakapan.

Pandemi Covid-19 menyingkap secara tanpa ampun kelemahan kota yang dibangun dengan dikendalikan oleh hukum-hukum yang bekerja secara dialektis di bawah kapitalisme, yaitu: konsentrasi dan ekstensi spasial. Hukum konsentrasi dan ekstensi spasial adalah sepasang hukum besi dalam pembangunan ruang di

bawah kapitalisme. Georagfer kadang-kadang memakai metafora yang dipinjam dari fisika nuklir, *implosion/explosion* (ledakan ke dalam/ledakan ke luar), untuk menjelaskan konsentrasi dan ekstensi spasial. Kota yang dibangun dengan berlandaskan pada model ini, sudah tidak menjamin keselamatan warganya.

Saya melihat Jakarta adalah sebuah contoh yang sangat sahih dari bagaimana hukum-hukum ini bekerja. Logikanya berasal dari logika pabrik. Bahwa untuk menghemat biaya produksi, sebuah pabrik yang terdiri dari berbagai peralatan dan buruh dikonsentrasikan dalam suatu ruang geografi tertentu. Di sisi lain, secara dialektis bekerja pula apa yang saya sebut sebagai ekstensi spasial. Ekstensi spasial muncul dalam bentuk skema fleksibilitas yang memungkinkan pabrik melakukan produksi secara terpisah. Misalnya komponen A dari suatu produk diproduksi di negara X, komponen B di negara Y, dan A dan B dirakit di negara Z menjadi totalitas sebuah komoditas. Sebuah contoh paling mutakhir yang menduduki kepala saya adalah produksi masker untuk kebutuhan mencegah terjadinya pembiakan SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19. Sebuah pabrik di Jakarta memesan masker dari penjahit di satu desa di Urutsewu, Kebumen, bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Di sini, pabrik masker yang berbasis di Jakarta melakukan ekstensi spasial, ruang produksi ditarik hingga molor sampai ke Urutsewu.

Hukum-hukum konsentrasi dan ekstensi spasial,

meski terlihat kontradiktif, pada dasarnya bekerja saling melengkapi atau dialektis. Susah untuk berbicara mengenai konsentrasi spasial tanpa pula berbicara mengenai ekstensi spasial. Dan sebaliknya. Pada dasarnya tujuannya tunggal: menekan ongkos produksi atau meningkatkan keuntungan bagi kapitalis.

Kota Jakarta secara masif berkembang menjadi aglomerasi perkotaan terutama sejak Orde Baru. Kawasan Tangerang dan Bekasi, terutama, adalah kawasan-kawasan dimana terdapat pabrik-pabrik, kota-kota yang merancang sistem sendiri yang muncul dalam bentuk-bentuk perumahan mewah, dan juga berbagai kompleks perkantoran. Semuanya itu adalah model kota yang dikendalikan oleh hukum besi konsentrasi spasial dimana berbagai bangunan/ infrastruktur dipusatkan.

Logika konsentrasi spasial dapat digunakan untuk memahami konstruksi aglomerasi perkotaan semacam itu, dimana uang-kapital, orang, dan alat produksi dikumpulkan. Perencana kota yang kritis menyebut model seperti ini sebagai pembangunan yang didikte oleh sektor swasta. Atau lebih tepat disebut pembangunan yang didikte oleh kepentingan kapitalis. Tujannya, tentu saja, untuk melancarkan proses dan menurunkan ongkos produksi kapitalis. Titik akhir dari model seperti itu adalah keuntungan bagi kapitalis.

Susunan ruang Jabodetabek, yang di dalamnya ada pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, adalah salah satu alasan mengapa kawasan Jabodetabek berkembang

menjadi aglomerasi perkotaan dengan total populasi mencapai hampir 30 juta orang. Infrastruktur ini penting, terutama kalau komoditas yang diproduksi adalah komoditas yang tidak dikonsumsi di sekitar Jabodetabek tapi di Pulau lain seperti Sumatra dan Kalimantan atau juga untuk eksport.

Di sisi lain ekstensi spasial juga bekerja secara simultan. Momen Covid-19 membantu kita untuk memahami cara kerja ekstensi spasial karena ia menyingkapnya lebih jelas, terutama dalam konteks aglomerasi perkotaan bernama Jabodetabek. Ketangguhan Jabodetabek seperti dites oleh Covid-19. Begitu Covid-19 mulai mewabah di Jabodetabek maka pabrik-pabrik yang ada di sana mau tak mau harus menghentikan proses produksinya. Di media, pada 19 April 2020, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa sebanyak 449.545 buruh di-PHK dan dirumahkan di Provinsi DKI Jakarta. Di-PHK artinya dipecat dari pekerjaan. Dirumahkan adalah istilah yang sering dipakai di dunia perburuhan untuk menyatakan keadaan ketika seorang buruh diberhentikan bekerja dengan statusnya masih sebagai buruh pada perusahaan terkait. Di atas kertas hak-haknya sebagai buruh harus tetap dipenuhi, tapi tampaknya kenyataan yang terjadi lebih sering bukan begitu.

Bagian dari ujian ini adalah munculnya aliran masif orang keluar dari Jakarta, atau secara lebih umum, Jabodetabek. Rilis KOBAR Jawa Tengah periode 11-13 April 2020 menyebutkan bahwa sejak 26 Maret hingga

14 April 2020, desa-desa di Jawa Tengah mencatat jumlah kedatangan sebanyak lebih dari 600 ribu orang. Rilis tersebut mencoba mengidentifikasi siapa orang-orang ini, dan sampai pada satu titik bahwa mayoritas pendatang ini adalah para pengungsi dari Jabodetabek yang mengevakuasi diri baik dari wabah Covid-19 maupun dari permasalahan ekonomi yang mereka tanggungkan.

Mereka diidentifikasi mayoritas berasal dari dua sektor. *Pertama*, sektor yang selama ini disebut dalam diskursus publik sebagai "sektor informal," atau sebenarnya secara lebih lugas, sektor-sektor yang bidang usahanya tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak pada pemerintah. Demikian saya memahaminya. Karena itu bahasa kekuasaan menyebutnya sebagai "informal," dimana tujuan yang secara inheren menggelayut di dalamnya adalah proses menuju "formal," atau proses mendisiplinkan agar mengurus izin dan kemudian membayar pajak. Dengan demikian, saya lebih senang menyebut apa yang disebut oleh diskursus publik sebagai "sektor informal" sebagai "sektor yang relatif otonom". Dalam kasus ini, dia relatif otonom dari negara.

Kedua, mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik dan terkena dampak di-PHK dan/atau dirumahkan karena perusahaannya tidak beroperasi karena wabah Covid-19. Orang-orang yang mengungsi ini pada dasarnya, demikian rilis itu membangun dugaan, memiliki asal dari Jawa Tengah, baik itu merupakan

generasi pertama maupun generasi kedua orang pedesaan Jawa Tengah yang pindah ke Jabodetabek.

Arti dari semua itu, untuk menghidupkan konsentrasi spasial, dibutuhkan juga ekstensi, yaitu memanjangkan ruang produksi ke pedesaan Jawa Tengah untuk menopang kelangsungan hidup aglomerasi Jabodetabek. Dalam diskusi di atas terlihat bagaimana ekstensi spasial dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, baik itu memindahkan proses produksi ke Urutsewu, Kebumen, maupun dengan mengaktivasi mesin penghisap raksasa bernama Jabodetabek guna menyedot orang-orang desa seperti para pengungsi Covid-19 yang sekarang kembali ke Jawa Tengah untuk masuk dan menjadi bagian dari dirinya. Jadi kota atau aglomerasi perkotaan yang dikendalikan oleh hukum konsentrasi dan ekstensi spasial pada dasarnya adalah satu varian dalam moda produksi kapitalisme darimana surplus diekstrak.

Lalu datanglah wabah Covid-19 yang secara tanpa ampun meluluh-lantakkan konsep kota yang dikendalikan oleh hukum konsentrasi dan ekstensi spasial ini. Segala kelemahan Jabodetabek seperti infrastruktur dan pelayanan kesehatan yang buruk, jurang ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin yang begitu dalam, hingga tata kelola pemerintahan antara unit-unit kepengurusan pemerintahan di Jakarta dengan berbagai kota di sekelilingnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi disingkap tanpa menyisakan ruang untuk berkelit/bersembunyi. Tak

banyak pilihan yang disisakan oleh wabah Covid-19. Fakta tentang kematian, PHK dan/atau perumahan buruh, dan mengungsi massal adalah bukti konkret. Ekstensi spasial berupa relasi dengan ontologi sosio-spasial yang lain, baik itu melalui aliran orang ataupun barang, mendorong perluasan penyebaran SARS-CoV-2 secara geografis. Sementara konsentrasi spasial, dalam sebuah ruang dengan kepadatan populasi yang tinggi, dapat mendorong semakin masifnya persebaran SARS-CoV-2 dalam ruang tersebut.

Dengan demikian, secara otomatis pilihan-pilihan pembangunan kota-kota industri gaya Jababeka dimana pabrik-pabrik ditumpuk dalam satu ruang menjadi tidak relevan lagi. Contoh seperti ini yang sedang digarap adalah Kawasan Industri Kendal, dimana sekitar 2.200 hektar lahan sedang diubah menjadi kawasan industri untuk mengkonsentrasikan pabrik-pabrik. Model-model seperti ini pada dasarnya adalah tiruan saja dari model Jabodetabek. Hanya lokasinya saja yang dipindah ke Kendal. Alasan utamanya adalah upah buruh yang murah di Jawa Tengah. Saya tidak melihat model pembangunan seperti ini bekerja di luar hukum konsentrasi dan ekstensi spasial.

Tumbangnya aglomerasi perkotaan gaya Jabodetabek oleh Covid-19 dan tidak relevannya lagi mendiskusikan kawasan/kota industri gaya Jababeka, dengan demikian, secara otomatis, seharusnya juga membuat kita menghapus semua percakapan tentang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Karena

pada dasarnya IKN yang dibayangkan masih bergerak dalam kerangka relasi dialektis antara hukum konsentrasi dan ekstensi spasial. Ini sekaligus membuka ruang sangat lebar bagi pertanyaan tentang model industri yang relevan; pertanyaan itu menemukan tanah yang gembur untuk tumbuh.

Namun, apa itu industri? Saya memahaminya melalui pendekatan kapital-industri dalam corak produksi kapitalis, dimana ia melibatkan sirkulasi uang-kapital, kapital-produktif, dan kapital-komoditas. Uang-kapital adalah uang yang dimasukkan ke dalam sirkuit produksi untuk mencetak nilai-lebih. Metamorfosis dari uang-kapital terus berlanjut ke kapital-komoditas. Kalau ia terhenti, maka ia bukan kapital-industri. Atau dengan kata lain, uang-kapital bertransformasi menjadi kapital-produktif. Jadi, kapital-produktif adalah adalah uang-kapital yang dipakai habis untuk membiayai produksi dalam industri. Dalam pabrik, kapital-produktif dapat menyediakan alat produksi (bahan-bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai alat produksi yang lain) dan untuk membayar gaji buruh. Kapital-komoditas adalah barang produksi yang bisa direalisasikan nilai-tukarnya dalam bentuk uang ketika dijual. Industrialisasi adalah adalah proses yang membentuk industri. Suatu proses yang darinya industri tercipta.

Industri integral adalah suatu industri yang sebisa/ sejauh mungkin keluar dari logika hukum konsentrasi dan ekstensi spasial, serta menyatu dengan konteks politik, ekonomi/kepemilikan, reproduksi sosio-

alamiah, lokasi geografis, demografi, ekologi, ekualisasi spasial, dan teknologi. Dalam bagian-bagian tertentu model integrasi yang dipaparkan berikut, diperlihatkan bagaimana model hipotetis industri integral dapat keluar dari logika konsentrasi dan ekstensi spasial.

Integrasi yang pertama adalah penyatuan antara produktivitas dan kesadaran politik. Di titik ini, industri integral harus mengambil prinsip-prinsip manajerial seperti efektivitas dan efisiensi dari industri kapitalistik untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi, tapi tanpa menegasikan kesadaran politik. Hal yang paling menyolok dari industri kapitalis adalah usaha depolitisasi yang terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan akhir agar secara politik sistem tidak digoyang oleh kesadaran politik kelas pekerja (buruh, petani, nelayan, dan lain-lain).

Kontradiksi di sini adalah bahwa di satu sisi manajemen kapitalis membutuhkan suatu kondisi kepatuhan yang terpimpin untuk menggerakkan produksi, sementara di sisi lain kesadaran politik membutuhkan suatu spontanitas atau kreativitas personal yang membebaskan. Menemukan titik keseimbangan dari kontradiksi ini, dalam hemat saya, adalah tantangan yang tidak mudah.

Integrasi yang kedua adalah dalam hal ekonomi/ kepemilikan. Dalam industri kapitalis, buruh adalah orang upahan yang menyamakkan tenaganya di pabrik. Tenaga adalah komoditas (satu-satunya) yang dia punya. Sehingga untuk makan, ia menjual tenaganya kepada

pemilik pabrik. Di hampir semua pabrik kapitalis, buruh tidak mengkonsumsi barang yang dia produksi karena barang-barang tersebut diperuntukkan bagi orang lain. Karena itu, salah satu saja, dia disebut terasing/teralinesi dari komoditas yang dia produksi.

Industrialisasi integral, sebisa mungkin mengintegrasikan buruh sebagai juga pemilik pabrik. Misalnya dalam bentuk kooperasi, dimana buruh sebagai anggota kooperasi ikut memiliki pabrik dan mendapatkan hak-hak ekonominya dalam dua bentuk, yaitu hak pembagian sisa hasil usaha sebagai anggota kooperasi dan hak atas jam kerjanya di pabrik. Ini sekaligus sebagai cara untuk membangun anti-tesis terhadap logika akumulasi yang menjadi elemen mendasar dalam kapitalisme. Kalau sampai pada titik buruh memproduksi barang yang akan dia konsumsi, maka ini akan meminimalisir tingkat alienasi.

Integrasi yang ketiga adalah memasukkan reproduksi sosio-alamiah ke dalam neraca perhitungan industri integral. Kapitalisme bekerja dengan sangat cerdik. Faktor-faktor seperti biaya yang muncul dari kerusakan lingkungan, segala tenaga yang dicurahkan untuk merawat dalam membesarkan buruh, maupun aktivitas di sektor yang disebut sebagai "sektor informal perkotaan" yang pada dasarnya menyumbang sangat besar untuk aktivitas di sektor "formal," semuanya tidak dimasukkan ke dalam neraca ekonomi kapitalisme. Semuanya saya sebut sebagai "sosio-alamiah" karena dasar ketiganya adalah perpaduan antara manusia

(sosio) dan non-manusia (alamiah). Kalau reproduksi sosio-alamiah dimasukkan ke dalam neraca ekonomi kapitalisme, niscaya kapitalis akan rugi. Sebagai contoh, biaya kerusakan lingkungan yang hampir pasti tidak dapat diukur dengan ukuran moneter, selalu saja lebih besar daripada semua keuntungan yang diperoleh dalam proses produksi di satu sirkuit komoditas di bawah kapitalisme. Reproduksi sosio-alamiah sangat mungkin dimasukkan ke dalam neraca ekonomi industri integral karena orientasi utamanya bukanlah mencari untung, tapi emansipasi.

Integrasi yang keempat adalah dalam hal lokasi geografis. Dalam pabrik kapitalis, buruh-buruh di Jawa memproduksi barang-barang komoditas untuk orang-orang di negara-negara kaya. Maka, jangan heran bila Anda membeli sepatu *Nike* di Amsterdam, misalnya, tertulis: *made in Indonesia*, *made in Vietnam*, ataupun *made in Bangladesh*. Ini namanya *global supply chain* sebagai imperialisme. Negara-negara miskin dimana upah minimum regional (UMR) murah, dijajah melalui rantai pasok komoditas global.

Dalam industri integral, ketiga elemen industri: uang-kapital, kapital-produktif, dan kapital-komoditas sebisa/sejauh mungkin integral dengan ruang geografis. Misalnya, pabrik di Grobogan. Buruhnya orang Grobogan. Jadi, model hipotetis ini tidak perlu terlalu tunduk pada hukum besi konsentrasi spasial dengan berusaha menyedot buruh dari kawasan lain. Didirikan dengan uang-kapital dari/orang Grobogan.

Produksinya untuk orang Grobogan atau pabrik tersebut memproduksi terutama apa yang dibutuhkan oleh orang Grobogan. Sehingga Grobogan tidak menjadi koloni dari, misalnya, Beijing atau Amsterdam. Elemen-elemen terakhir ini membuat model hipotetis ini lebih mampu menghindari paksaan dari hukum ekstensi spasial.

Poin integral dengan ruang geografi membawa kita mau tak mau harus juga berfikir mengenai integrasi demografi. Industri integral dibangun dengan mempertimbangkan persebaran populasi, kepercayaan, keterampilan, komposisi gender, usia, dan juga ritme kerja manusia dalam satu ruang geografi tertentu. Sebagai contoh, Pulau Jawa yang padat penduduknya diarahkan untuk mengembangkan industri yang mampu menyerap pekerja dalam jumlah besar.

Integrasi yang keenam adalah dalam hal ekologi. Pabrik-pabrik kapitalis mengandalkan bahan bakar fosil seperti batubara. Karena itu Pulau Kalimantan dikeruk untuk menyuplai kebutuhan industri di Jawa atau China atau India. Industri integral, dalam hal bahan bakar atau energi, mengandalkan bahan bakar yang tersedia di tingkat lokal. Yang paling melimpah di Indonesia adalah adalah energi nirpolusi, misalnya energi matahari, angin, atau gelombang laut. Intinya, industri diintegrasikan dengan sumber bahan bakar berdasarkan situasi ekologi sekitar.

Integrasi tentang ekualisasi spasial menarget penghilangan secara pelan-pelan perbedaan ruang

di desa dengan di kota.[7] Poin ini mempertimbangkan kritik yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi geografer feminis. Bahwa, relasi desa dengan kota ini timpang. Perkotaan dominatif dan pedesaan tersubordinasi. Dominasi terjadi karena antara lain desa atau non-kota seringkali dianggap sebagai ruang "domestik". Rekahan atau sobekan metabolisme yang maskulin berpilin dengan bagaimana pembangunan kapitalistik memproduksi ruang. Pola umumnya adalah aktor perkotaan mengekstrak surplus dalam relasinya dengan pedesaan. Ekstraksi ini dimediasi, misalnya, oleh pertukaran barang atau orang/buruh/tenaga kerja. Barang dan/atau buruh dari desa hanya diambil begitu saja, tanpa memperhitungkan energi yang telah menubuh dalam diri mereka sehingga siap untuk diambil begitu saja. Model ini sangat selaras dengan dalil metabolisme-sobek kapitalisme yang melihat desa sebagai situs produksi dan/atau ekstraksi (bahan dan orang) dan kota sebagai pusat konsumsi dan/atau aglomerasi. Dalam memproduksi bahan pangan di pedesaan misalnya, nutrisi diserap tanaman. Ketika panen, bahan pangan dibawa ke kota. Bersamaan

[7] Dewasa ini susah mendefinisikan apa itu desa dan apa itu kota. Desa sudah mengalami urbanisasi karena proses urbanisasi yang meluas (*extended urbanization*) misalnya melalui aliran barang, orang, dan uang. Batas-batas administratif seringkali sudah tidak relevan. Dalam tulisan ini, yang saya maksud dengan desa memiliki ciri-ciri umum, meski tidak selalu, antara lain: terikat dalam satu kesatuan administratif, kekerabatan penghuninya yang masih mudah dilacak, dan usaha mereka yang umumnya bergerak di sektor pertanian. Sementara kota adalah ruang dimana orang, barang, dan alat-alat produksi dikonsentrasikan.

dengan itu terjadi dua proses dalam kasus ini. Yang pertama adalah tanah pertanian yang semakin kurus karena nutrisinya diambil dalam bentuk hasil pertanian. Yang kedua, yang diambil dari lokasi pertanian itu adalah hasil pertanian itu sendiri. Sementar di kota, situs aglomerasi, sampah-sampah organik diproduksi dan menjadi pengotor lingkungan perkotaan. Inilah pola umum yang bekerja dalam metabolism-sobek di bawah kapitalisme.

Integrasi ekualisasi spasial mau menghilangkan itu. Dengan kata lain, keluar dari metabolisme-sobek kapitalisme (*metabolical rift*) dengan jalan mengubah cara pandang (*epistemological shift*). Desa dan kota tidak dilihat sebagai dualitas sistem metabolisme yang berbeda/terpisah/sobek dan berelasi secara timpang. Bahwa kota juga bisa menjadi situs produksi dengan berbagai skema pertanian perkotaan. Sebaliknya desa bisa menjadi pusat industri produk tertentu.

Sedikit lebih kendor dalam melihat proyek ekualisasi spasial ini adalah dengan cara mendorong interaksi langsung antara situs produksi pangan klasik seperti desa, dengan situs konsumsi klasik seperti kawasan perkotaan. Melalui interaksi langsung diharapkan kedua ontologi sosio-spasial ini akan lebih memahami dan menghormati satu sama lain. Selain itu, dalam interaksi langsung, relasi yang timpang dapat sedikit ditekan karena hilangnya fungsi distributor yang mengekstrak surplus dalam relasi produsen-konsumen. Asumsinya, hilangnya distributor yang mengekstrak surplus, di satu

sisi dapat membuat produsen mendapatkan insentif yang lebih baik dalam sebuah transaksi, dan di sisi lain, konsumen mendapatkan penurunan harga/nilai beli.

Industri integral menggunakan teknologi yang menyatu dengan konteks sosialnya. Salah satu diskusi/debat panjang dalam pembangunan kapitalistik adalah pasal "transfer teknologi". Negara-bangsa seperti indonesia dibayangkan belajar teknologi modern sebagai buah dari Modernitas (ini nama zaman, bukan berarti maju) dari negara kaya yang akan "mentransfer" teknologinya. Dalam industri integral, teknologi yang dikembangkan adalah teknologi tepat guna yang berakar dalam tradisi. Misalnya, cangkul tidak perlu diimpor tapi cukup diproduksi dengan mengembangkan pandai besi.

Kedelapan poin integral atau kemenyatuan di atas, secara keseluruhan diintegrasikan lagi menjadi satu cara untuk memandang dunia, terutama dalam hal jalan industrialisasi atau co-produksi ruang seperti apa yang akan ditempuh. Sebuah konsepsi akan co-produksi ruang; integrasi kesembilan: sebuah totalitas industri integral.

Kapitalisme Model Ganda untuk Memahami Covid-19

Ketika pada akhir bulan Maret 2020 saya menulis dengan tajuk “*Revolusi Covid-19*,” banyak komentar/ pertanyaan yang saya terima. Semampu saya, komentar/ pertanyaan itu sudah saya jawab satu persatu dalam tulisan berikutnya “”*Revolusi Covid-19”: Konfirmasi*“. Dalam jawaban tersebut, saya menyandarkan argumen pada SARS-CoV-2, virus penyebab wabah Covid-19, sebagai aktor non-manusia (*actant*). Namun, saya menyimak bahwa banyak dari komentar atau pertanyaan tersebut berasal dari kelompok yang memiliki konsumsi bacaan kritis, misalnya studi tentang kapitalisme. Satu benang merah dari banyak pertanyaan/komentar itu yang dapat saya lihat adalah titik tolak pertanyaan yang berangkat dari (kepentingan) manusia. Misalnya, kalau bukan oleh manusia, atau lebih spesifik manusia yang dianggap progresif, maka susah diterima akan lahir sebuah revolusi. Saya dapat memahami ketika tulisan bertajuk “*Revolusi Covid-19*” itu diluncurkan, banyak komentar yang cenderung kontra terhadapnya.

Tidak ada yang salah dalam hal itu. Sesuatu yang sangat normal karena yang bertanya/berkomentar adalah manusia. Namun bagi saya, semua komentar/ pertanyaan tersebut hanya menambah bukti terhadap

bagaimana saya melihat klaim-klaim yang selama ini beredar. Bahwa meskipun secara retoris manusia selalu dikatakan sebagai bagian dari ekologi, manusia selalu dikatakan sebaiknya jangan melihat semuanya berpusat di manusia (antroposentris), pada kenyataanya semua itu cenderung menjadi seruan-seruan di atas kertas, yang susah untuk dijadikan sebagai kerangka untuk menganalisis sesuatu. Ketika dihadapkan pada satu persoalan seperti Covid-19, sudut pandang yang dikampanyekan itu rontok, dengan atau tanpa disadari oleh manusia yang melontarkan komentar/pernyataan itu sendiri.

Selain karena susah menerima non-manusia sebagai aktor pembeda, saya melihat sudut pandang seperti yang muncul dalam pertanyaan/komentar tersebut berasal dari satu sistem pemikiran yang dalam tradisi Marxis disebut sebagai proses produksi nilai-lebih dalam pabrik. Saya akan membuka lapisan ini.

Marx (terutama dalam *Capital I*) merumuskan proses produksi nilai-lebih dalam pabrik melalui suatu rumus K = k + V. Saya sebut ini sebagai rumus I. K di sini mengacu pada total kapital yang dimiliki oleh seorang kapitalis ketika memulai usahanya dalam pabrik; k adalah kapital konstan yang menyimbolkan alat-alat produksi seperti mesin-mesin dan bahan mentah; dan V adalah kapital variabel yang merupakan elemen dari kerja buruh.

Kapital disebut kapital karena kemampuannya berkembang (valorisasi kapital). Proses penganakan

kapital dalam produksi mengubah formula di atas menjadi K' = k + V + N. Saya sebut ini sebagai rumus II. Dimana K' adalah total kapital setelah proses produksi yang di dalamnya terdapat nilai-lebih. K' lebih besar dari K. Itulah sebabnya disebut bahwa kapital mengalami valorisasi atau penganakan. Berikutnya adalah k, kapital konstan, dengan komposisi seperti yang dipaparkan di atas. V adalah waktu kerja buruh yang dibayar oleh kapitalis. N adalah nilai-lebih yang dieksploitasi oleh oleh kapitalis melalui waktu kerja-lebih buruh. N menjadi selisih antara K' dengan K.

Yang dimaksud waktu kerja-lebih buruh dapat saya pahami sebagai berikut. Untuk hidup, misalnya, pada dasarnya seorang buruh hanya perlu bekerja katakanlah 6 jam dalam sehari. Pada kenyataannya, misalnya, dia bekerja selama 8 jam. Yang dibayar di pabrik adalah waktu-kerjanya yang 6 jam. Ini disebut kerja-perlu. Sementara sisanya yang 2 jam lagi adalah kerja-lebih. Kapitalis, salah satunya, mengambil/mengeksploitasi keuntungan dari kerja-lebih 2 jam yang tidak berbayar, dan ini yang membentuk nilai-lebih (N).

Dari penjelasan itu, maka segera terlihat bahwa dalam rumus II, nilai-lebih (N) dieksploitasi oleh kapitalis dari waktu kerja-lebih buruh. Dengan demikian, dapatlah disebutkan bahwa dalam rumus II, buruh memiliki peran sentral memproduksi nilai-lebih dalam proses penganakan kapital.

Lantas, dimana peran non-buruh dalam proses produksi nilai-lebih? Dalam rumus II seperti di atas,

non-buruh ada di k, kapital konstan, tapi tidak terlihat berperan sebanyak buruh dalam memproduksi nilai-lebih. Atau dengan kata lain, dapat saya sebutkan bahwa rumus II adalah suatu proses produksi nilai-lebih yang sangat berpusat pada buruh. Orang menyebutnya *labour-centred*. Nilai-lebih dilihat datang dari eksploitasi terhadap buruh. Saya menyebut konsepsi kapitalisme seperti ini sebagai "konsepsi kapitalisme model tunggal".

Saya menduga bahwa komentar/pertanyaan terhadap tulisan bertajuk "*Revolusi Covid-19*" di atas, mereka sadari atau tidak, bersumber dari, atau setidaknya ada hubungannya dengan, pemahaman yang berakar pada rumus I dan II tentang proses valoriasi kapital di dalam pabrik.

Rumus II di atas pula, saya duga berdasarkan hasil bacaan saya terhadap banyak buku David Harvey, yang menjadi akar tulisan-tulisannya, sehingga dia, seperti yang saya kritik dalam tulisan "*Revolusi Covid-19*" melihat revolusi masih akan datang. Sementara saya, dalam tulisan itu melihat revolusi sedang berlangsung, yang saya sebut dengan "*Revolusi Covid-19*". Dengan kata lain, bagi David karena konsepsi kapitalismenya adalah "model tunggal" dimana peran buruh vital, elemen revolusioner terutama adalah buruh.

Meski dalam beberapa kesempatan David menulis tentang kota dan urbanisasi dan melihat kota sebagai situs perlawanan anti-kapitalisme masa kini, saya tidak melihatnya secara *rigid* menjelaskan, atau melahirkan

suatu rumusan, tentang bagaimana produksi nilai-lebih di kota atau dalam proses urbanisasi sebagai varian spesifik dalam moda produksi kapitalisme berbeda dengan produksi nilai-lebih di dalam pabrik. Dengan kata lain, teori produksi nilai-lebih yang dibayangkan oleh David ketika ia menulis tentang kota kemungkinan besar adalah teori produksi nilai-lebih dalam pabrik. Sehingga, karena elemen revolusioner dalam teori produksi nilai-lebih dalam pabrik adalah buruh, maka, meskipun sudah mengidentifikasi kota dan proses urbanisasi sebagai situs anti-kapitalisme masa kini, saya sedikit berani "berspekulasi" bahwa isi kepala David tentang produksi nilai-lebih adalah rumusan produksi nilai-lebih di dalam pabrik. Ini sependek yang dapat saya pahami, salah satunya, membuat dia susah untuk menafsirkan bahwa non-Marxis macam SARS-CoV-2 juga punya revolusi.

Lantas sistem produksi nilai-lebih seperti apa yang saya bayangkan ketika mengatakan bahwa non-buruh juga dapat melakukan revolusi?

Dalam hal ini saya banyak membaca buku dan artikel-artikel Jason W. Moore, dimana dia mengembangkan apa yang saya sebut sebagai "kapitalisme model ganda". Di dalam tulisan bertajuk "*Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-Ekologis*" di majalah PRISMA yang terbit pada tahun 2019, saya sudah menguraikan (menjelaskan, menotasikan, dan menggunakannya sampai keluar nilai moneter) rumusan-rumusan Jason W. Moore dalam bagaimana saya menganalisis krisis

air di Yogyakarta. Jadi, apabila ada keingintahuan lebih lanjut dari pembaca tentang detil-detil seperti sumber pustaka, saya sarankan untuk membuka tulisan itu.

Dalam tulisan itu pula saya berusaha menunjukkan bahwa non-buruh juga memiliki agensi/materialitas sama dengan buruh. Dengan model penalaran tersebut saya menyebut krisis air di Yogyakarta sebagai krisis sosial-ekologis. Yang membentuk krisis bukan hanya aktivitas manusia, dalam hal ini buruh, seperti yang banyak disampaikan dalam teks soal krisis kapitalisme. Konsepsi-konsepsi krisis dalam kapitalisme biasanya membayangkan suatu produksi komoditas (barang jualan) yang berkelebihan atau yang biasa disebut krisis "*overproduction*". Sebagai akibat dari produksi yang berlebihan adalah terjadinya PHK, semakin banyak terjadi pengangguran buruh, sehingga krisis model ini sering juga disebut sebagai krisis "pengangguran". Di dalam pemodelan krisis seperti ini, buruh memegang peran penting sebagai agen yang bekerja memproduksi komoditas. Saya melihat ini sebagai elemen "manusia" atau "sosial" di dalam krisis kapitalisme.

Dalam model krisis sosial-ekologis, saya melihat non-manusia juga berperan penting. Misalnya dalam krisis air di Yogyakarta seperti yang saya jelaskan dalam tulisan di PRISMA itu, saya melihat pasokan air dari *aquifer* (batuan sarang) yang kalah banyak dari tingkat ekstraksi air tanah oleh manusia. Kekurangan pasokan ini adalah sumbangan dari non-manusia terhadap krisis yang timbul. Jadi, krisis dalam kapitalisme

juga dapat terjadi karena kekurangan pasokan ("*underproduction*"). Ini yang saya maksud sebagai dimensi "ekologi" dalam krisis kapitalisme. Penting disampaikan, saya tidak melihat manusia terpisah dari ekologi. Yang saya maksud "ekologi" dalam konteks ini adalah non-manusia. Sehingga, elemen manusia + elemen non-manusia, sosio + ekologi, membentuk krisis sosial-ekologis.

Model konsepsi kapitalisme yang dapat melihat peran non-buruh, atau lebih umum, non-manusia, seperti ini adalah "kapitalisme model ganda". Kapitalisme model ganda membayangkan bahwa produksi nilai-lebih bukan hanya berpusat pada eksploitasi terhadap waktu kerja-lebih buruh, namun juga apropriasi terhadap non-buruh. Jadi, "ganda" yang dimaksud di sini adalah proses apropriasi dan eksploitasi.

Yang dilakukan dalam membangun konsepsi "kapitalisme model ganda" adalah "membuka" kapital konstan sehingga elemen-elemennya terlihat menjadi lebih eksplisit. Saya menotasikannya sebagai K' = Mu + Ba + P + V + N. Saya sebut ini rumus III. K' dalam rumus III ini adalah total kapital setelah valorisasi. Mu adalah elemen-elemen murah yang diapropriasi oleh kapitalisme. Dapat kita masukkan ke dalam Mu adalah calon buruh, bahan mentah, bahan makanan, dan energi murah. Semuanya disebut murah karena kapitalis tidak melakukan investasi untuk memproduksi mereka untuk siap diapropriasi. Jadi murah di sini adalah murah bagi

kapitalis. Saya ambil contoh, buruh.

Katakanlah seorang buruh bekerja di satu pabrik pada usia 18 tahun. Kapitalis pemilik pabrik merekrutnya, mempekerjakannya, dan kemudian membayar gajinya. Pertanyaannya, siapa yang menanggung semua biaya, merawat, dan membesarkan buruh hingga berusia 18 tahun, atau hingga siap untuk bekerja di pabrik? Jawabanya adalah: orang tua atau keluarga si buruh. Intinya, kemungkinan besar bukan kapitalis. Kapitalis tidak mengeluarkan apa-apa selama 18 tahun hingga buruh dapat dipekerjakan. Inilah sebabnya, calon buruh yang sudah siap bekerja di pabrik ini disebut "buruh murah."

Hal yang sama terjadi terhadap bahan mentah, bahan makanan, dan energi murah. Saya ambil satu contoh lagi, misalnya energi minyak bumi. Kapitalis minyak bumi tidak ikut berinvestasi dalam menciptakan minyak bumi melalui proses geologis selama jutaan tahun. Bumi yang melakukannya. Kapitalis hanya datang dan mengambil begitu saja (mengapropriasi) minyak dari dalam Bumi. Ba dalam rumus III di atas adalah biaya untuk mengambil begitu saja (biaya apropriasi). Selanjutnya P adalah peralatan untuk produksi. V dan N masing-masing adalah kapital variabel dan nilai-lebih, sama seperti dalam rumus II.

Jadi, dengan membuka kapital konstan, sekarang kita dapat melihat bahwa sumber nilai-lebih ada dua yaitu apropriasi non-buruh dan eksploitasi buruh – "kapitalisme model ganda".

Konsepsi kapitalisme model ganda memungkinkan percakapan yang lebih sambung dengan isu-isu yang selama ini berada di luar kapitalisme model tunggal, seperti isu lingkungan, feminisme, dan "sektor informal perkotaan" atau "sektor yang relatif otonom dari negara". Isu lingkungan, seperti perhitungan atas kerja Bumi menghasilkan minyak bumi dan juga dampak lingkungan yang muncul karena pengambilan minyak bumi, tidak ada dalam neraca perhitungan produksi nilai-lebih kapitalisme model tunggal. Demikian juga segala kerja merawat dalam diskursus feminisme. Atau juga "sektor informal perkotaan". "Sektor informal perkotaan" yang relatif otonom dari negara ini tidak ada dalam neraca produksi nilai-lebih kapitalisme model tunggal, tapi diakui berperan penting menopang sektor formal yang tercatat dalam neraca ekonomi negara. Di kota macam Jakarta misalnya, sektor informal perkotaan menyediakan makanan yang relatif murah. Banyak pekerja kantoran yang disebut sebagai sektor formal membeli makanan di warung sektor informal.

Dengan mengikuti cara berfikir yang saya bangun di atas, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana kapitalisme model ganda dapat menjelaskan Revolusi Covid-19? Revolusi adalah suatu perubahan sosial-ekologis. Dalam kasus Covid-19, perubahan itu sangat dahsyat. Tanpa saya sampaikan di sinipun tentang perubahan-perubahan tersebut, saya percaya pembaca sudah paham maksud saya. Yang melakukan revolusi, dalam hemat saya, adalah orang atau elemen yang

berada dalam suatu sistem, tapi tidak diuntungkan dari, atau malah justru dirugikan oleh, beroperasinya sistem tersebut.

Dengan demikian, sangat dapat dipahami, dalam kapitalisme model tunggal, karena yang dianggap berperan besar dalam produksi nilai-lebih adalah buruh, maka yang dibayangkan sebagai elan revolusioner adalah buruh. Sebagai elemen yang tidak diuntungkan dari, atau malah dirugikan oleh, beroperasinya sistem kapitalisme, maka, demikian jalan pemikiran ini bergulir, buruh menghendaki perubahan. Buruh menghendaki revolusi.

Dalam kapitalisme model ganda, buruh bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam produksi nilai-lebih, ada juga non-buruh yang hadir dalam berbagai bentuk "murah" seperti calon buruh, bahan mentah, bahan pangan, dan energi itu tadilah. Karena mereka dalam rumusan ini dilihat ikut berkontribusi dalam produksi nilai-lebih, maka konsekuensinya mereka juga harus dihitung sebagai agen perubahan. Jadi, memasukkan/menghitung peran mereka dalam rumusan produksi nilai-lebih pada dasarnya adalah langkah untuk lebih mempertimbangkan mereka sebagai agen yang dapat menciptakan pembeda.

SARS-CoV-2, seperti yang disebutkan di banyak publikasi, secara umum dapat dijelaskan sebagai virus yang bertransmisi ke manusia. Logikanya sederhana. Operasi kapitalisme telah membabat hutan, mengurug laut, menimbun rawa-rawa, menghambat aliran sungai,

mencemari udara, dan lain-lain. Intinya, mendegradasi lingkungan. Degradasi lingkungan telah menyebabkan habitat patogen (virus, bakteri, dan mikro-organisme penyebab penyakit) mengalami degradasi. Mereka harus mencari habitat yang baru. Dan manusia adalah target empuk bagi mereka.

Di titik ini, SARS-CoV-2 dapat dilihat sebagai elemen yang berada dalam sistem kapitalisme, namun dia tidak diuntungkan dari, atau justru dirugikan oleh, beroperasinya kapitalisme. Kerugian baginya adalah degradasi terhadap habitatnya. Maka, sangat rasional kemudian kalau kita melihatnya menginginkan perubahan, atau yang dalam hal ini saya sebut sebagai revolusi. Tentu saja ini adalah interpretasi saya sebagai manusia, apa yang terjadi dengan virus, sejatinya tampaknya hanya diketahui oleh virus.

Akhirul kalam, dengan mendudukkannya dalam teori produksi nilai-lebih, saya berharap tulisan ini dapat membuat lebih jelas tentang kapitalisme model tunggal dan ganda, bagaimana perbedaan di antara keduanya berkonsekuensi terhadap cara kita memahami dunia, misalnya dalam hal ini adalah memahami/menjelaskan Covid-19, dan tentu saja mungkin akan membantu kita untuk merumuskan dunia seperti apa yang kita inginkan sejak sekarang ke depan.

Proyek Ibu Kota Negara Sebagai Solusi Ruang-Waktu Kapitalisme[8]

Sejak awal persebaran wabah Covid-19 di Indonesia, realokasi anggaran pembelanjaan negara (APBN) dari pembangunan infrastruktur ke penanganan pandemi Covid-19 adalah salah satu tuntutan yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat. Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jawa Tengah, adalah salah satu aliansi masyarakat sipil yang menyuarakan tuntutan tersebut sejak awal. Misalnya, rilis KOBAR tanggal 11 April 2020 dengan tajuk "*Re-alokasi Anggran Infrastruktur: Dari pembangunan maskulin ke pembangunan yang merawat*" secara eksplisit menyampaikan hal itu dalam himbauannya.

Rilis KOBAR tersebut melabeli proyek-proyek infrastruktur Jokowi seperti 227 Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden 58/2018 serta mega-proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) sebagai bagian dari pembangunan yang maskulin dengan karakter elitis/dominatif, timpang, destruktif, dan kapitalistik. Sementara KOBAR menghendaki

---

[8] Bagian penjelasan tentang 3 jenis banjir di Jakarta diambil dari tulisan: https://mojok.co/bsm/esai/proses-depolitisasi-dan-repolitisasi-dalam-kasus-banjir-jakarta/ yang dimuat pada 14 Januari 2020.

suatu pembangunan yang merawat, yang diidentifikasi memiliki karakter demokratis, setara, lestari, dan distributif. Pada 23 April 2020, laman *binis.tempo.co* memuat pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tentang anggaran untuk IKN direalokasikan untuk penanganan Covid-19.

Proyek IKN adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, persisnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Argumentasi dari pemerintah yang sering muncul di media mengapa pemindahan ini dilakukan, misalnya, adalah karena banjir dan amblesan tanah di Jakarta sudah semakin tak tertangani, atau juga untuk pemerataan pembangunan. Kelompok-kelompok LSM yang tergabung dalam koalisi #BersihkanIndonesia seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional dan Kalimantan Timur, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional dan Kalimantan Timur, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, dan Trend Asia melalui publikasinya pada tahun 2019 yang bertajuk "*Ibu Kota Baru Buat Siapa?*" secara fundamental sudah mengkritik proyek IKN. Tulisan ini sepakat dengan argumen-argumen yang dimunculkan oleh Koalisi tersebut. Tulisan ini akan memperdalam dua argumentasi yang sering keluar dari pemerintah, bahwa proyek IKN adalah langkah untuk keluar dari persoalan-persoalan di Jakarta seperti banjir dan amblesan tanah serta untuk pemerataan pembangunan.

Diskusi tentang kedua argumetasi yang sering dinyatakan oleh pemerintah itu dilakukan dengan cara mengkontekstualisasikan kasus IKN di Zaman Covid-19. Tulisan ini akan melakukannya dengan cara, pertama, memperlihatkan bagaimana krisis sosial-ekologis di Jakarta dalam bentuk banjir dan amblesan tanah pada dasarnya diproduksi melalui suatu moda produksi kapitalisme. Dalam produksi krisis sosial-ekologis ini direproduksi pula ketimpangan. Solusi terhadap banjir dan amblesan Jakarta dalam bentuk IKN di Kalimantan Timur dikerjakan dengan moda produksi yang juga kapitalistik. Jadi proyek IKN juga akan menimbulkan krisis sosial-ekologis berikutnya. Bentuk-bentuk krisis sosial-ekologi yang akan muncul di IKN seperti yang disebutkan oleh Koalisi LSM-LSM di atas adalah kerusakan lingkungan di lokasi baru dan menambah risiko bencana seperti banjir.

Kedua, dari segi pemerataan pembangunan, akan diperlihatkan bahwa tidak mungkin pemerataan pembangunan muncul dari skema pembangunan yang kapitalistik. Hukum-hukum dalam pembangunan kapitalisme seperti konsentrasi spasial, sentralisasi nilai-guna, dan akumulasi kapital akan digunakan untuk memperlihatkan bahwa kapitalisme selamanya menciptakan pembangunan yang timpang.

Ketiga, dalam hal kontekstualiasi kritik dengan peristiwa wabah Covid-19, bagaimana kota atau aglomerasi perkotaan seperti Jabodetabek rontok di masa pandemi Covid-19 sudah dibahas panjang

lebar dalam tulisan bertajuk "*Industri Integral: Arah co-produksi ruang sejak Covid-19*". Dengan demikian secara otomatis proyek IKN yang tetap tunduk di bawah hukum-hukum itu, dapat dipastikan akan menjadi sebuah model yang sangat rentan terhadap wabah seperti pandemi Covid-19. Dengan kata lain, sudah tidak layak dikembangkan kalau pertimbangannya adalah keselamatan (calon) penghuni kota.

Saya mulai dari bagaimana pembangunan yang kapitalistik memproduksi ruang Jakarta yang banjir dan ambles, atau kombinasi dari keduanya. Dalam hal banjir, saya melihat ada tiga jenis banjir di Jakarta: (1) banjir kiriman dari Puncak, (1) banjir karena hujan lokal, dan (3) banjir dari laut yang mana kenaikan muka air laut berkombinasi dengan penurunan muka tanah. Model-model banjir ke-1, 2, dan 3 ini dapat saling berkombinasi.

Untuk banjir model pertama, salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya kemampuan ekosistem Puncak untuk menyerap air hujan. Salah satu penyebab pengurangan ini adalah karena adanya konversi penggunaan lahan di Puncak. Pemberitaan-pemberitaan di media telah menunjukkan contoh-contoh kalangan yang memiliki rumah atau villa peristirahatan di Puncak.

Termasuk di antara mereka adalah golongan para pejabat. Yang pernah saya temukan muncul di media ialah Wiranto (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2019-2024), Sutiyoso (Gubernur DKI Jakarta 1997-

2007), Oetojo Oesman (Menteri Kehakiman 1993-1998), H.B.L. Mantiri (Pangdam IX Udayana Januari-Juli 1992), (Alm.) Basofi Sudirman (Gubernur Jawa Timur 1993-8), Radinal Mochtar (Menteri PU 1998), Ginandjar Kartasasmita (Menteri Pertambangan dan Energi 1993-1998), Djadja Suparman (Pangkostrad 1999-2000), dan Probosutedjo (adik tiri Soeharto).

Banjir jenis kedua, banjir lokal, juga dapat dilihat seperti itu. Misalnya grup Ciputra yang pendirinya baru saja meninggal dan pada 2019 masuk jajaran 20 orang terkaya di Indonesia. Dalam hal banjir Jakarta, peran sentral Ciputra dapat saya lihat pada pembangunan Pantai Indah Kapuk. Sebelum tahun 1980-an, kawasan ini adalah kawasan hutan bakau dengan kemampuan menampung air mencapai 16 juta meter kubik. Namun, hutan ini kemudian dikonversi menjadi lapangan golf (76,2 hektare), fasilitas olahraga dan rekreasi (20,43 hektare), taman (86,5 hektare), perumahan (368,34 hektare), pergudangan (17,48 hektare), area bisnis (88,18 hektare), dan lain-lain (57,5 hektare). Secara keseluruhan, konversi itu mengurangi/menghilangkan kemampuan lahan menampung air.

Konversi penggunaan lahan di Puncak dan Jakarta Utara yang mengubah kawasan hutan penampung dan penyerap air ke peruntukan lain adalah dua dari sekian penyebab banjir Jakarta. Air yang turun tidak tertampung dan terserap, tapi langsung masuk ke saluran air dan sungai-sungai. Kalau saluran air dan sungai-sungai tidak terpelihara karena penuh sampah

atau sedimen, permasalahan akan semakin kompleks. Di satu sisi air hujan yang turun menunjukkan kecenderungan semakin banyak (karena perubahan iklim memperparah momen ekstrem hidrologi). Di sisi lain saluran-saluran banyak yang tak terpelihara. Keduanya saling memperkuat, dan *resultante* yang sangat masuk akal adalah banjir.

Sekarang banjir jenis ketiga yang datang dari laut. Dalam kombinasi penyebab kenaikan muka air laut + penurunan tanah, kenaikan muka air laut menyumbang kecil, sedangkan penurunan tanah lebih besar sekitar 20 kali. Di beberapa lokasi, tanah turun lebih dari 10 cm/tahun, sementara angka kenaikan muka air laut yang sering saya temukan di berbagai publikasi sekitar 0,5 cm/tahun. Dengan besaran ini, perhatian lebih layak dialamatkan pada penurunan muka tanah.

Mengapa muka tanah di Jakarta turun? Para pakar mengidentifikasi penyebabnya meliputi: Ekstraksi air tanah dalam, pembebanan bangunan, pengompakan material sedimen, dan aktivitas tektonik. Dari keempat faktor ini, sependek yang dapat saya amati, yang menjadi fokus penelitian (sekaligus perdebatan) adalah ekstraksi air tanah dalam dan pembebanan bangunan.

Diskusi/debat persisnya berada di seputar "Seberapa jauh keduanya menyumbang penurunan tanah di Jakarta?". Ada pakar/praktisi yang menyatakan penyebab dominannya adalah ekstraksi air tanah dalam. Ada pakar/praktisi yang menyebut pembebanan bangunan. Ada juga pakar yang menyampaikan adanya

variasi: Di satu tempat penyebab dominannya adalah ekstraksi air tanah dalam, di tempat lain pembebanan bangunan.

Yang menyebabkan penurunan tanah adalah ekstraksi air tanah dalam, bukan air tanah secara umum. Di Jakarta, air tanah dengan kedalaman lebih dari 40 m biasanya disebut air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah dengan kedalaman kurang dari 40 m.

Model hidrogeologi ada yang menunjukkan bahwa *aquifer* (batuan sarang air tanah) di bagian utara Jakarta telah berubah dalam rentang waktu sekitar 1 abad. Pada 1900-an, di bawah tanah Jakarta Utara air tanah bergerak dari bawah (*aquifer* dalam) ke atas (*aquifer* dangkal). Di tahun 1990-an, yang terjadi adalah sebaliknya, air tanah bergerak dari atas (*aquifer* dangkal) ke bawah (*aquifer* dalam). Ini artinya air tanah di *aquifer* dalam semakin berkurang.

Faktor mana pun yang menjadi penyebab utama, ekstraksi air tanah dalam atau pembebanan bangunan, keduanya bisa diperas lagi menjadi satu hal: Soal pembangunan yang masif di Jakarta. Beban-beban bangunan muncul dari gedung-gedung pencakar langit. Sementara mayoritas pengekstrak air tanah dalam adalah sektor bisnis dan industri (mal, hotel, apartemen, pabrik bir). Poinnya, ekstraksi air tanah dalam hanya berkemungkinan kecil bisa dilakukan warga dengan rumah biasa, apalagi warga miskin kota. Alasannya sederhana, membor air tanah dalam itu mahal.

Saya melihat krisis dalam bentuk banjir dan amblesan tanah yang ada di Jakarta ini sebagai krisis sosial-ekologis dengan sudut pandang bahwa momen krisis itu terutama tercipta melalui aksi para elit politik dan bisnis seperti membangun villa di Puncak, mengkonversi kawasan-kawasan hijau di dalam Kota, dan juga mengekstrak air tanah dalam. Semuanya itu adalah bagian "sosial" dari proses-proses yang membentuk krisis sosial-ekologis itu. Sementara bagian ekologinya antara lain adalah letak Jakarta atau Jawa yang dekat dengan garis khatulistiwa dengan intensitas sinar matahari dan curah hujan yang tinggi mempercepat pelapukan batuan yang tidak tertutup vegetasi, mempercepat erosi, sehingga hasil akhirnya misalnya adalah sungai-sungai yang mengalami sedimentasi yang intens. Dan ini meningkatkan risiko terjadinya banjir. Contoh lain dari peran non-manusia, yang dalam konteks ini saya sebut sebagai "ekologi," adalah penyebaran atau struktur dari batuan sarang air tanah itu sendiri. *Aquifer* dalam yang memiliki kandungan air dalam di daerah Jakarta Utara misalnya, menjadi salah satu faktor mengapa amblesan terjadi di bagian utara. Kombinasi elemen sosial dan ekologi inilah yang membentuk krisis sosial-ekologis.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu yang berperan besar dalam produksi ruang Jakarta yang rawan banjir adalah kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, yang mana mayoritas mereka melakukannya untuk kesenangan (vila peristirahatan

di Puncak) dan akumulasi kapital (oleh sektor bisnis di dalam kota ataupun persewaan vila di Puncak). Sementara, dalam studi-studi terhadap dampak bencana banjir perkotaan, sudah sangat lazim terlihat bahwa kelompok yang terdampak relatif paling parah adalah kelompok-kelompok rentan macam orang tua, anak-anak, perempuan, dan orang miskin. Dengan demikian, kelompok rentan harus menanggung akibat dari kesenangan dan akumulasi kapital kelompok elite politik dan bisnis. Ini adalah satu proses pembangunan ruang yang sangat kapitalistik dimana pembangunan di satu sisi berjalan beriringan dengan penghancuran di sisi lain.

Krisis sosial-ekologis yang timbul karena pembangunan kapitalistik ini mau disembuhkan dengan solusi pindah ibu kota melalui proyek IKN. Di sini, konsep *spatio-temporal fix* yang dikenalkan oleh David Harvey dapat dipakai untuk memahami kasus ini. Teori *spatio-temporal fix* menjelaskan bagaimana kapitalisme memproduksi suatu krisis, dan kemudian juga menciptakan solusi terhadap krisis itu. Solusi itu dapat berupa solusi ruang atau spasial, dalam kasus ini adalah memindahkan ibu kota secara geografis.

Solusi yang muncul juga dapat berupa solusi *temporal* yaitu dengan cara mencari kredit. Kredit disebutkan sebagai *temporal fix* karena pada dasarnya utang atau kredit adalah menggeser masalah yang dihadapi sekarang ke masa depan. Anda meminjam uang 10 juta untuk menutupi kebutuhan Anda hari ini,

maka kalau misalnya jangka waktu pembayarannya adalah 10 bulan, maka Anda menggeser masalah Anda hari ini ke dalam 10 bulan pembayaran utang itu. Itu sebabnya kredit atau utang disebut dengan *temporal fix*.

Dalam kasus IKN, proyek ini adalah *temporal fix* karena dana yang akan dipakai untuk membangun IKN adalah dana dari para investor. Kalau bentuknya bukan utang, bentuk lain bisa muncul, misalnya konsesi pengelolaan dengan jangka waktu tertentu. Artinya, developer akan memegang hak suatu kawasan atau bangunan sampai waktu tertentu yang disepakati. Prinsipnya, ini sama saja dengan utang. Solusi ruang dan waktu ini yang kemudian digabungkan menjadi solusi ruang-waktu, atau *spatio-temporal fix*.

Di titik ini, apabila ditambah dengan risiko kerusakan lingkungan seperti kerusakan ekosistem mangrove, bahaya risiko banjir, dan krisis multi-dimensi yang disuarakan oleh kelompok-kelompok LSM yang disebutkan di atas, maka proyek IKN adalah sebuah proses memproduksi risiko yang lain di tempat yang lain. Jadi, dalam cara pandang seperti ini, pemindahan ibu kota adalah suatu tindakan yang secara pakem mengikuti hukum pembangunan kapitalistik yang timpang, yaitu menghancurkan satu tempat dan kemudian pindah ke tempat lain (*seesaw movement of capital*). Pertama Jakarta dihancurkan dulu, giliran berikutnya adalah lokasi IKN di Kalimantan Timur.

Argumentasi pemerataan pembangunan juga bisa

ditebas. Pembangunan kapitalistik selalu memproduksi ketimpangan, bukan menciptakan pemerataan. Di lapis pertama mungkin terlihat benar bahwa dengan dipindahnya ibukota dari Jawa ke Kalimantan, maka itu adalah suatu langkah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang timpang yang mau diratakan di sini adalah ketimpangan Jawa dan Non-Jawa.

Namun, sepanjang itu dilakukan dengan pola pembangunan kapitalistik, maka pemerataan itu mustahil dilakukan. Pembangunan kapitalistik sarat dengan hukum konsentrasi spasial, sentralisasi nilai guna, dan akumulasi kapital. Secara logis, konsentrasi spasial bekerja dengan cara mengumpulkan orang ataupun alat produksi pada suatu lokasi geografis. Tujuannya adalah untuk menurunkan ongkos dalam produksi. Dalam kasus IKN, sejak pertengahan 2019 sudah terbaca di media daring bahwa sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke ibu kota yang sedang dibayangkan itu.

Sementara sentralisasi nilai guna adalah suatu upaya terus menerus untuk menumpuk kepemilikan barang di tangan semakin sedikit orang. Dalam kasus IKN hukum sentralisasi nilai-guna bekerja sedikit berbeda. Lahan-lahan yang ada di lokasi IKN di kedua Kabupaten di Kalimantan Timur itu pada dasarnya ada di bahwa penguasaan kelompok-kelompok konglomerat seperti yang diuraikan dengan sangat rinci dalam publikasi "*Ibu Kota Baru Buat Siapa?*". Para konglomerat pemilik

lahan ini, kalau dianalisis dari aliran keuntungan yang bakal muncul, dapat diidentifikasi akan mendapatkan berbagai jenis keuntungan. Pertama, seperti yang sering dipaparkan dalam teori-teori tentang sewa dan/atau harga tanah, maka harga tanah-tanah yang mereka kuasai akan meningkat karena adanya proyek IKN. Kedua, bagi para pengusaha yang perusahaan tambangnya menyisakan lubang-lubang tambang di kawasan lokasi IKN, maka momen proyek IKN ini akan mencuci "dosa" mereka dari bahaya lubang-lubang raksasa tersebut.

Kedua pola keuntungan yang akan didapatkan oleh para pemegang konsesi di kawasan IKN ini menunjukkan bagaimana hukum akumulasi kapital bekerja. Akumulasi bekerja dengan cara injeksi kembali nilai-lebih dan/atau keuntungan yang diperoleh seorang kapitalis melalui suatu proses produksi ke dalam sirkuit kapital yang baru sehingga kapitalnya terus mengalami penganakan. Dalam kasus proyek IKN, kapital para pemegang konsesi yang sudah diinvestasikan dalam bentuk penguasaan tanah akan mengalami panganakan melalui munculnya proyek IKN.

Dengan analisis seperti itu, maka akan semakin mudah menunjukkan bahwa janji pemerataan yang disebutkan pemerintah pada dasarnya adalah suatu proses produksi ketidakadilan, terutama kalau dilihat melalui apa yang terjadi di kalangan para konglomerat dan warga desa di sekitar lokasi IKN. Di kalangan konglomerat, proyek IKN adalah skema bagi-bagi

keuntungan. Sementara, seperti yang dapat disimak dalam laporan Koalisi #BersihkanIndonesia, orang-orang desa yang ada di kawasan IKN, sampai laporan itu dipublikasikan, cenderung hanya bisa menonton dan mengikuti kabar-kabar soal proyek IKN melalui media arusutama atau juga rumor-rumor yang beredar.

Kedua analisis di atas, yang menunjukkan bagaimana IKN direncanakan sebagai *spatio-temporal fix* untuk lari dari krisis sosial-ekologis, mau tak mau harus menghadapi kenyataan kegagalan kota-kota yang dikendalikan oleh hukum-hukum kapitalisme. Momen Covid-19, poin *ketiga*, telah menunjukkan bagaimana kota-kota itu telah rontok dalam berbagai bentuk (tak berfungsi dan menjadi pusat pandemi Covid-19 dari mana orang harus mengungsi). Maka, yang harus dilakukan sejatinya adalah memperdalam re-alokasi anggaran yang disebutkan oleh Sri Mulyani dengan cara mulai berfikir tentang satu perubahan yang lebih radikal dalam bagaimana ruang seperti kota diproduksi, yaitu mencoba keluar dari cengkeraman hukum-hukum yang bekerja di bawah corak produksi kapitalisme.

Solidaritas Produsen-Konsumen di Masa Pandemi Covid-19

Poster tentang "Saweran Beli Beras Untuk Rakyat Miskin Kota" yang menyebutkan dua kelompok sebagai pelakunya: Rakyat Miskin Kota Jakarta dan Petani Kendeng Jawa Tengah, begitu menginterupsi perhatian saya. Saya melihat praktik ini sangat revolusioner. Dan begini sebaiknya hidup kita diatur. Dengan demikian, saya ingin mengatakan bahwa revolusi itu rasional (dari sudut pandang saya). Yang melakukan praktik ini di masa pandemi Covid-19 bukan hanya kedua kelompok ini, ada banyak kelompok lain. Misalnya petani Kulon Progo yang mendonasikan hasil panen sayuran mereka kepada dapur-dapur umum di Yogyakarta, atau juga kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria.

Saya tertarik dengan kerjasama Rakyat Miskin Jakarta dengan Petani Pegunungan Kendeng, selain karena saya melihatnya sebagai satu praktik yang revolusioner dan rasional, ada hal lain dari poster ini yang membetot perhatian saya. Tentang ini, lebih kepada latar belakang diri saya sendiri. Pada sepanjang 2016-7, saya melakukan penelitian di Jakarta untuk

kepentingan menulis disertasi. Sampai sekarang penulisan disertasi itu masih terus berlangsung. Tema disertasi saya adalah hubungan antara urbanisasi Jakarta terutama sejak Orde Baru dengan dengan momen banjir dan pembangunan infrastruktur banjir.

Saya mengenal beberapa anggota dari Kelompok Rakyat Miskin Kota yang memobilisasi saweran untuk membeli beras di atas, seperti Gugun Muhammad yang dari *facebook*-nya saya melihat poster terkait. Mereka adalah salah satu kelompok yang darinya saya belajar dalam menggarap disertasi, meskipun penelitian saya tidak benar-benar fokus pada kelompok mereka.

Kampung-kampung miskin Jakarta tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)—organisasi yang memobiliasi saweran. Saya lumayan familiar dengan beberapa kampung di antaranya, seperti Kampung Lodan, Kampung Krapu, dan Kampung Tongkol. Kampung-kampung itu adalah tempat-tempat di Jakarta dimana saya pernah tidur, semalam dua. Wawancara saya dengan Gugun Muhammad pada 2017 sengaja dilampirkan sebagai bagian dari buku ini untuk memperjelas apa dan bagaimananya JRMK.

Kampung-kampung ini adalah kampung yang merupakan bagian yang dulu akan digusur karena satu proyek pembangunan infrastruktur penanganan banjir Jakarta bernama *Jakarta Urgen Flood Mitigation Project* (JUFMP), atau yang juga sering dikenal dengan *Jakarta Emergency Dredging Initiative* (JEDI). Proyek ini didanai dengan uang pinjaman dari Bank Dunia sebesar 139,63

Juta USD; dan total nilai proyek ini adalah sebesar 189,95 Juta USD.

Dalam dokumen bertajuk *Consolidated Summary of the Environmental Impact Assessment*, atau saya sebut saja AMDAL, dari JUFMP yang diterbitkan pada tahun 2011 disebutkan bahwa Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tampung 4 reservoir penampungan air di Jakarta serta kapasitas aliran 11 sungai. Dalam rangka peningkatan kapasitas tampung dan aliran tersebut, AMDAL mengidentifikasi ada 1,109 unit struktur bangunan dan 5,228 orang yang akan terdampak. Oleh AMDAL orang yang akan terdampak ini disebut sebagai "*project affected people*". Mereka akan "dibersihkan" dari tempat mereka tinggal. Intinya, penggusuran.

Kampung-kampung kota seperti Lodan, Tongkol dan Krapu disebutkan sebagai kawasan-kawasan yang merupakan *linkage* dari JUFMP. *Linkage* di sini maksudnya adalah secara langsung tidak berada dalam skema pelaksanaan JUFMP, namun dia tetap menjadi target program dengan skema pendanaan yang berbeda dari apa yang sudah dibungkus dalam rencana JUFMP.

Saya tidak sepakat dengan proyek penanganan banjir perkotaan seperti ini karena dalam pemahaman saya, ia adalah satu intervensi infrastruktur yang sangat politis meskipun sering dicitrakan sebagai apolitis.

Yang saya maksudkan dengan politis dalam konteks ini adalah bahwa proyek seperti JUFMP melakukan ketidakadilan sosio-spasial, karena di satu sisi, dengan

sangat cepat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang tinggal di bantaran kali dan waduk-waduk sebagai penyebab meningkatnya risiko banjir di kota macam Jakarta. Argumentasi tekno-politis di belakangnya adalah bahwa keberadaan kampung-kampung seperti itu mempersempit badan sungai, mengurangi debit aliran sungai, dan pada akhirnya hal ini dianalisis akan menyebabkan banjir perkotaan.

Menurut saya ini tidak adil. Kalau kita memperhatikan Kota macam Jakarta, ada banyak pembangunan lain yang dilakukan terutama oleh sektor komersial seperti di Puncak ataupun di dalam Kota yang juga melanggar aturan tata ruang pada masanya, terutama sejak Orde Baru (1965/7) hingga sekarang (2020). Namun sampai hari ini, sektor komersial tersebut tidak menjadi sasaran penggusuran proyek penanganan banjir. Pada tahun 2018, bersama dua orang kolega di IHE-Delft, Institute for Water Education dan University of Amsterdam, Michelle dan Margreet, kami menulis sebuah artikel dengan tajuk "*Uneven Urbanisation: Connecting Flows of Water to Flows of Labour and Capital Through Jakarta's Flood Infrastructure*". Artikel tersebut dapat dibaca *on-line* di *Antipode: A Radical Journal of Geography*.

Dalam artikel itu, kami memperlihatkan bagaimana pembangunan-pembangunan di masa Orde Baru di Jakarta oleh sektor-sektor komersial seperti hotel, pemukiman mewah, dan mall menyumbang sangat besar pada berkurangnya kemampuan kota Jakarta

secara keseluruhan dalam menghadapi risiko banjir. Kami menyebutnya sebagai proses urbanisasi, yaitu suatu proses konversi penggunaan lahan di dalam atau di luar kota, yang darinya kota macam Jakarta pelan-pelan tersusun.

Pembangunan infrastruktur, dalam analisis kami memperparah kondisi ketidakadilan. Dalam artikel tersebut kami memperlihatkannya dengan menjelaskan dua proyek penanganan banjir di Jakarta, yaitu Normalisasi Kali Ciliwung dan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Ketidakadilan sosiospasial yang kami lihat intinya adalah adanya seleksi ruang secara kategoris. Saya sebut ketidakadilan sosiaspasial, karena bagi saya kawasan-kawasan macam bantaran kali di Jakarta adalah perpaduan antara manusia (sosio) dengan ruang (*space*). Keduanya tidak dapat dipisahkan. Secara bersamaan keduanya membentuk entitas sosiospasial. Para perencana dapat memilih ruang mana yang akan dilindungi dari banjir, dan ruang mana yang akan digusur. Jadi, di dalam intervensi yang sering dicitrakan teknis-apolitis seperti infrastruktur penanganan banjir, pada dasarnya pada dirinya dia adalah tekno-politis, yaitu teknis dan sangat politis.

Dari sisi pedesaan, saya mendengar atau barangkali berkenalan dengan jaringan Petani Pegunungan Kendeng Jawa Tengah mungkin sekitar tahun 2006 atau 2007. Saya mengenal jaringan itu dari aktivitas Yayasan Desantara, sebuah LSM yang berkantor di

Depok, dan mengerjakan advokasi di Pati, Jawa Tengah. Yang saya pahami, para petani di sana berjuang menolak pembangunan tambang dan pabrik semen karena aktivitas tersebut akan mengkonversi lahan-lahan pertanian mereka dan membuat kering mata air-mata air dari mana mereka mendapatkan pasokan air. Singkat kata, akan sangat merugikan dan merusak penghidupan mereka.

Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur penanganan banjir Jakarta dapat dilihat dari sebuah laporan tahunan *Indocement* pada tahun 2014. Anak perusahaan *Indoncement* adalah salah satu perusahaan yang ditolak oleh para Petani Pegunungan Kendeng. Laporan tahunan di 2014 itu secara eksplisit menyatakan bahwa produk semen mereka antara lain akan ditujukan untuk mengisi pasar permintaan semen yang mereka perkirakan akan meningkat karena adanya pembangunan-pembanguna infrastruktur seperti NCICD di Jakarta.

Di titik ini, dalam artikel yang saya sebutkan di atas, kedua situs ini, baik itu kampung-kampung kota di Jakarta yang akan menjadi korban penggusuran karena pembangunan infrastruktur penanganan banjir maupun para petani di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah yang terancam ruang hidupnya karena pembangunan tambang dan pabrik semen pada dasarnya adalah satu bagian dari totalitas bernama kapitalisme. Satu berlokasi di kota, dan satu lagi berlokasi di pedesaan. Kami, dalam artikel itu, mendorong koneksi yang lebih

kuat antara kelompok-kelompok seperti itu untuk menantang proses urbanisasi yang timpang (*uneven urbanisation*).

Dengan penjelasan demikian, rasanya tidaklah akan mengejutkan bagi siapapun mengapa perhatian saya langsung terbetot ketika poster itu muncul di media sosial. Saya melihat praktik saweran untuk membeli beras itu adalah satu praktik yang mendorong koneksi yang lebih kuat antara kelompok rakyat miskin Kota Jakarta dengan para Petani Pegunungan Kendeng. Satu berperan sebagai konsumen beras, yang satu lagi sebagai produsen. Selain tentu saja saya kenal secara personal orang-orang yang berada di sekitar aktivitas tersebut.

Mengapa dalam situasi pandemi Covid-19 ini saya melihat praktik tersebut revolusioner? Barangkali para pelaku tidak menjelaskan praktik mereka seperti itu. Alasan-alasan mereka, menurut dugaan saya, adalah alasan sehari-hari. Di satu sisi, di masa pandemi Covid-19 Rakyat Miskin Kota Jakarta butuh makan, mereka butuh beras. Di sisi lain, bagi para Petani Pegunugan Kendeng, masa-masa ini adalah masa panen padi, mereka perlu menjual komoditasnya, yaitu beras. Meskipun saya kenal secara personal dengan beberapa pelaku praktik ini, tapi saya tidak tertarik menanya mereka tentang praktik yang sedang mereka kerjakan. Mereka boleh setuju dengan analisis ini, boleh juga tidak, boleh juga tidak menghiraukan sama sekali.

Pola standar distribusi komoditas dalam model

produksi kapitalisme adalah para petani menjualnya kepada pedagang, kemudian para pedagang menjualnya kepada konsumen. Jadi, antara petani (produsen) dengan pengguna (konsumen) ada pedagang (distributor dalam pengertian ekonomi yang pasti mengambil untung). Pedagang beras ini adalah kapitalis, dia membeli beras dari petani terutama bukan untuk dia makan, tapi untuk dia jual dan dari situ dia mendapatkan keuntungan, alias dari situ dia mencari makan.

Rumus umum dalam kapitalisme pasar seperti itu adalah apa yang disebut dengan metamorfosa uang menjadi komoditas dan uang yang sudah beranak. Sederhananya, seorang pedagang datang ke Petani Pegunungan Kendeng dengan membawa uang, katakanlah sebesar A. Ia membeli beras dari para petani itu. Beras (B) di sini, ketika ia memasuki sebuah sirkuit tersebut, sudah menjadi kapital dalam bentuk komoditas. Namun sirkuit itu belum lengkap. Baru setengahnya. Setengah yang lain adalah, pedagang itu membawa berasnya ke pasar, atau suatu ruang transaksi, dan menjualnya dengan harga yang lebih besar dari A, atau saya sebut saja sebagai A'. Dari sini terlihat bahwa si pedagang beras mendapatkan keuntungan dari fungsi yang dia jalankan sebagai pedagang beras. Kalau saya pendekkan relasi-relasi yang saya ceritakan di atas, dapat dinotasikan sebagai A-B-A'. Bermula dari uang, berubah ke beras, beras kemudian menjadi uang yang lebih besar bagi si pedagang. Ini adalah rumus dasar

kapitalisme dalam pasar, yang dalam hal ini adalah pasar beras.

Praktik yang disampaikan dalam poster menghilangkan fungsi distributor yang mencari untung. Tentu saja secara fisik beras harus diangkut dari Pegunungan Kendeng ke Jakarta, atau tetap didistribusikan. Namun di sini telah terjadi perubahan sistem. Distributor bukan orang yang mencari untung melalui fungsi menyalurkan barang. Distributor adalah distributor dalam arti fungsional: menyalurkan barang. Ini revolusioner; yang diubah adalah sistem dalam sirkulasi beras.

Mengapa ini rasional? Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Dari sisi produsen, bagi Petani Pegunungan Kendeng, saya rasa harga beras Rp. 9 ribu tidak terlalu murah. Saya tidak tahu, dugaan saya, kalau itu terlalu murah, para petani tidak akan mau. Ataupun kalau sedikit di bawah harga pasar, maka mungkin mereka punya "nilai" lain yang mereka anut dalam hidupnya yang di luar "nilai" yang bekerja di ranah ekonomi, yaitu solidaritas (di masa Pandemi Covid-19). Rasanya solidaritas dari Petani Pegunungan Kendeng tidaklah terlalu mengheherankan. Saya tahu bahwa pernah, barangkali di tahun 2017, JRMK mengirimkan perwakilannya untuk menemani para petani dari Pegunungan Kendeng dalam aksi demonstrasi mereka di Jakarta menolak pembangunan tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Dari sisi Rakyat Miskin Kota Jakarta, harga Rp. 10

ribu per kilo, menurut dugaan saya, juga tidak terhitung mahal dibandingkan dengan harga beras dengan jenis yang sama di pasar. Kalau terlalu mahal, maka kelompok Rakyat Miskin Kota mungkin tidak akan mau membeli. Atau juga mereka punya “nilai” lain di luar kalkulasi ekonomi, yaitu *paseduluran* (persahabatan/ persaudaraan) dengan para Petani Kendeng Jawa Tengah. Lagipula bagi Rakyat Miskin Kota, mereka melakukan mobilisasi solidaritas dari publik melalui penggalangan dana seperti yang dimuat dalam poster. Jadi mereka tidak membeli beras Rp. 10 ribu per kilogram, tapi Rp 5 ribu per kilogram. Lima ribu yang lain diharapkan didapatkan dari mobilisasi saweran itulah.

Intinya yang dilakukan dalam praktik ini, selain mobilisasi solidaritas pada masa Pandemi Covid-19, adalah menghilangkan distributor yang mengambil untung dari fungsi mendistribusikan barang, dan berujung, dugaan saya, pada kepuasan di kedua belah pihak (produsen dan konsumen). Kepuasan ini bisa saja bermacam-macam penyebabnya. Misalnya puas karena bisa bersolidaritas, adalah sesuatu yang sangat mungkin. Secara praksis (konseptual dan praktik) mereka menghilangkan fungsi kapitalis dalam komoditas beras pada perputaran yang sedang dibicarakan. Mungkin terlihat kecil (bagi sebagian orang), hanya 9 ton beras (bagi saya ini banyak banget). Namun yang tak kalah penting di balik itu adalah idenya, dan bagaimana ide dan rintisan prakteknya bisa mengubah sistem.

Tentu saja, penting dicatat, bahwa yang namanya Rakyat Miskin Kota Jakarta dan Petani Pegunungan Kendeng, masing-masing bukanlah entitas yang homogen. Pasti ada diferensiasi di dalamnya—dan itu di luar jangkauan yang ingin saya diskusikan dalam tulisan ini. Atau lebih tepat, kedua kelompok ini jauh lebih paham tentang hal ini daripada saya. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah melakukan bagiannya dalam konteks sehari-hari (kebutuhan menjual beras dan kebutuhan makan): membangun interaksi langsung antara produsen-konsumen. Tugas kita semua adalah mendukungnya, menyampaikannya pada teman kita, dan mengangkatnya dari satu praktik parsial (1 komoditas beras dari dan untuk satu kelompok tertentu) menjadi satu kesadaran yang lebih universal.

Gugun Muhammad: Tagline kita tanah untuk penggarap![9]

Gugun Muhammad (Gugun, dalam teks wawancara: G) adalah pendamping Komunitas Anak Kali Ciliwung (KAKC) sekaligus *community organizer* (CO) di *Urban Poor Consortium* (UPC). KAKC terletak di tepi Anak Kali Ciliwung Utara di Jakarta Utara dan memiliki anggota 3 kampung, yaitu Tongkol, Krapu dan Lodan. Pada 2014 yang lalu, kampung-kampung yang tergabung dalam KAKC ini mau digusur oleh pemerintah sebagai bagian dari program pengelolaan banjir Kota Jakarta. Anak Kali Ciliwung Utara masuk sebagai *linkage* dalam program pengendalian banjir yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI, *Jakarta Emergency Dredging Initiative/Jakarta Urgent Flood Mitigation Programme* (JEDI/JUFMP), yang dijalankan dengan pinjaman dana sebanyak 139,64 juta Dollar AS dari Bank Dunia. *Linkage* di sini maksudnya adalah saluran yang tidak berada dalam program secara langsung, namun menjadi target program dengan skema pendanaan yang berbeda.

---

[9] Wawancara ini pernah dimuat di: https://medium.com/@geliterasi/gugun-muhammad-tagline-kita-tanah-untuk-penggarap-9f70913f5603, dimuat ulang di sini dengan izin dari Gugun Muhammad.

Namun warga KAKC melakukan berbagai inisiatif untuk menunjukkan bahwa mereka bukan masalah, melainkan solusi bagi penanganan banjir Jakarta. Berbagai inisiatif itu, misalnya saja, memotong sendiri rumah-rumah mereka sehingga membentuk jalan swa-inspeksi di pinggir Kali, membangun *septic tank* di rumah-rumah mereka sehingga air buangan rumah tangga tidak langsung dibuang ke Kali, membentuk model rumah berlantai 3 dari bambu dengan konsep ruang multi-fungsi, menggalakkan pertanian perkotaan di sekitar tanggul kali, pembuatan pupuk kompos, mengurangi pemakaian plastik, dan tentu saja membentuk organisasi KAKC.

KAKC bergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), sebuah organisasi rakyat miskin di Jakarta yang pendiriannya didorong oleh UPC. Di tingkat nasional, bersama dengan berbagai komunitas rakyat miskin di berbagai kota seperti Surabaya, Lampung, Kendari, Makassar, Aceh, Sidoarjo dan Tulang Bawang, JRMK membentuk Jejaring Masyarakat Miskin Indonesia (JERAMI).

Wawancara ini adalah usaha untuk menggali lebih jauh tentang politik "hak atas kota" di Jakarta, terutama bagaimana "hak atas kota" sebagai sebuah jargon politik dioperasionalkan dalam momen pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam pilkada DKI 2017 JRMK-UPC melakukan "kontrak politik" dengan salah satu pasangan calon waktu itu, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin

Uno. Di media sosial kontrak politik bertajuk "*Tanah untuk Penggarap*" ini muncul dengan 5 poin turunan: 1)Perubahan tata ruang untuk perkampungan, 2) Legalisasi lahan perkampungan, 3)Program hunian terjangkau untuk rakyat miskin, 4)Perizinan usaha bagi pedagang kaki lima, dan 5)Bantuan alih profesi bagi tukang becak. JRMK-UPC, dalam kontrak politik atau perjanjian mengikat dengan Anies-Sandi, berkewajiban memenangkan Anies-Sandi di 125 TPS. Apabila di salah satu saja dari 125 TPS itu Anies-Sandi tidak menang, maka perjanjian batal. Dan ternyata JRMK-UPC sukses mengerjakan tugas sesuai janjinya. Wawancara ini, pada dasarnya, berusaha membahas kontrak politik tersebut.

Gugun Muhammad diwawancara oleh Bosman Batubara dari Literasi.co (L) di halaman rumah keluarga Gugun, di bantaran Anak Kali Ciliwung Utara, Kampung Tongkol pada 24 Mei 2017. Dalam obrolan ini juga bergabung Sekjen KAKC, sehingga dalam beberapa kesempatan Sekjen juga memberikan pandangan-pandangannya. Rekaman wawancara ditranskrip oleh Muslich Bahaomed dari Literasi.co. Naskah kemudian dibaca ulang dan dikoreksi seperlunya oleh Gugun dan Wardah Hafidz (juga dari UPC). Selamat membaca.

L: Bisa anda ceritakan latar belakang kontrak politik JRMK-UPC, darimana datangnya kontrak politik itu?

G: Kita mulai itu sekitar tahun 2007 di Jakarta. Inspirasi untuk melakukan kontrak politik itu dari jaringan

UPC di Amerika Serikat, ACORN yang dikepalai oleh Wade Rathke, yang membuat kontrak politik dengan Obama pada masa jabatan pertama. Wade bersama rombongan berkunjung ke UPC pada 2006, pada 2007 dia mengirimkan satu orang stafnya untuk mengajar UPC menerapkan metode *one-on-one* untuk *organizing*, yang ketika itu digunakan untuk melakukan mobilisasi suara (*rap*, *canvass*) pada pilkada 2007, yang saat itu UPC mendukung Adang Dorojatun, dan memberikan 10 ribu suara untuk Adang. Sebelum-sebelumnya gak ada sejarahnya UPC itu masuk dalam momentum politik. Walaupun sebelumnya pernah juga UPC dorong simbolik untuk calon gubernur, tapi masuk dalam salah satu kandidat itu belum pernah. Nah, 2007 itu salah satu inspirasinya. Karena latar belakangnya begini. Kita ini katakanlah begini, berjuang menyelamatkan satu-dua kampung, tapi puluhan kampung digasak gitu *lho*. Menyelamatkan di sini dimaknai bekerja bersama antara warga dan UPC. Data UPC sampai 2004: kita mendampingi sekitar enampuluhan kampung di Jabodetabek. Kontrak politik bukan soal berkejaran dengan soal penggusuran tetapi soal *visibility*, legalitas dan partisipasi RMK [Rakyat Miskin Kota] sebagai warga kota yang sah dalam pengelolaan kota. RMK ini kebanyakan tinggal di kampung-kampung miskin yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai *illegal*, pemerintah tidak hadir kecuali ketika akan menggusur, tidak ada pelayanan publik, tidak ada hak-hak dasar yang dipenuhi, apalagi untuk bisa berpartisipasi

dalam kehidupan dan pengelolaan kota. Dengan RMK Jakarta mengorganisasikan suara mereka saat pilkada untuk melakukan kontrak politik, mereka diakui keberadaannya, mereka menjadi *visible*, dan dipenuhi hak-hak dasarnya (jika calon yang didukung menang). Isi kontrak politik memang sengaja dibuat umum agar berlaku untuk semua RMK di kota terkait, tanpa ikatan legalitas resmi. Pengandaiannya kontrak politik adalah langkah awal untuk warga mengorganisasikan diri; setelah pilkada usai, RMK yang berkelompok per kampung melakukan kegiatan lanjutan agar tuntutan dalam kontrak politik terpenuhi. Dengan demikian, ikatan kontrak politik bukan ikatan legal formal tetapi pada kekuatan massa RMK yang terorganisasi. Salah satu penyebab masifnya penggusuran adalah kebijakan. Ini yang mencoba dengan pendekatan di luar kekuasaan itu masih sulit dijangkau. Akhirnya karena kekuasaan itu menentukan wajah kota, mau gak mau kita juga menggunakan cara politik. Salah satunya ya. Tidak meninggalkan cara-cara demonstrasi, tapi itu salah satu cara yang dipakai. Nah, pilihannya gak banyak. Waktu itu diskusinya begini. Apakah kita mau mencalonkan sendiri? Itu 2007, pilkada Jakarta waktu itu Foke melawan Adang. Pilihannya apakah memunculkan calon sendiri, ataukah mau ikut barisan kepartaian dan menjadi pendukung di dalamnya, ataukah mencalonkan independen di luar kepartaian, ataukah kontrak politik? Artinya kita tidak masuk dalam struktur mereka. Artinya kita memasukkan program lalu kita

transaksi suara. Waktu itu, masuk ke partai, lalu ikut mendukung, lalu kita memasukkan calon ke partai itu, tidak disepakati. Bukan pilihan yang bagus. Terus calon independen belum bisa. Terus yang terakhir ya itu, kontrak politik. Tetapi waktu itu kontrak politik itu sudah sangat transaksional. Kalau transaksional artinya harus ada angka yang dihitung. Artinya, kalau kita mau ngajuin, nuntut calon transaksional pertukaran, kita minta program, si calonnya pasti minta suara. Nah suara itu ya hitung-hitungan jumlah. Nah waktu itu kita mikirin gimana caranya menghitung jumlah orang. Kita bisa bilang 100.000 suara, 200,000 suara, bahkan 700.000 suara. Ini bagaimana caranya. Nah, itu kemudian kita yang kerja bareng ACORN. Salah satu dari mereka datang dan ngajarin kita. Waktu itu kita kumpul bareng kader-kader UPC. Latihan itu yang namanya "nge-rap". Istilahnya melakukan penyadaran, tapi orang per orang. Kenapa namanya rap? Itu dari musik rap. Musik itu kan cepat dan berulang-ulang. Nah itu persis dengan metode yang diterapkan. Nah, obrolan itu cepat dalam skala waktu. Jadi, metode rap adalah percakapan yang sistematis untuk mengubah dan menumbuhkan kesadaran. Tumbuhnya kesadaran itu dibuktikan dengan mau bergabung dalam kegiatan dan menjadi penggerak bagi yang lain. Jika yang bersangkutan belum mau gabung maka proses percakapan diulang dari depan lagi. Dari langkah penggalian itu, diulang lagi sampai dua kali. Dan masih *gak* mau gabung, setelah itu tinggal. Waktu pertama ditolak musti ngulang lagi, itu

rap. Waktu itu latihan betul satu persatu orang. Terus juga datengin orang-orang luar [Jakarta] anggota UPC, waktu itu Jakarta sebagai eksperimen. Dikeroyok untuk semua. Ya waktu itu berhasil kita lakukan. Prioritas pertama adalah menggarap warga di kampungnya sendiri. Setelah selesai di kampungnya lalu harus jalan ke kampung lain untuk mengajak warga bergabung melalui proses rap. Karena kalau hanya kampung-kampung yang dalam jaringan UPC, gak akan cukup itu suara. Berarti mereka harus keluar kampung begitu. Terus terjadi kontrak politik dengan Adang, waktu itu Adang kalah. Itu konteks awal mulai adanya kontrak politik.

L: Oke itu kontrak politik dengan Adang, setelah itu?

G: Setelah itu Makassar. Makassar itu selang satu tahun atau dua tahun, 2008. Terus 2009 merencanakan kontrak politik juga. Sudah nge-rap. Tetapi dari sekian calon presidennya itu, tidak sreg semua. Kita mau pilih yang terburuk pun rasanya tidak sreg. Awal itu ada Megawati, SBY, Amien Rais, Wiranto. Satu itu tidak sreg, yang kedua orang yang pontensi menang juga gak mau. Waktu itu juga sempat ditolak, padahal waktu itu kita sudah kumpulin satu juta suara di nasional. Satu juta suara itu dalam arti, karena nge-rap itu tertulis iya hasilnya. Tidak sekedar orang bilang iya, tapi iya-nya itu dibuktikan dengan tanda tangan. Artinya sudah ditangan itu satu juta suara itu, tapi akhirnya batal kita lakukan. Waktu itu yang potensial kan SBY dan Megawati. Tetapi

akhirnya tidak kita lakukan. Dan belakangan beruntung tidak jadi dilakukan waktu itu. Kalau jadi dilakukan ya menjadi bagian dari masa kelam SBY yang sulit terkontrol. Terus 2010 Surabaya. Itu betul-betul dalam arti memunculkan calon baru. Tidak mendukung Risma. Dulu Fitra itu orang dari gerakan sosial di Surabaya. Tapi kalah. Itu kita lakukan di Surabaya. Warganya nge-rap ke kampung-kampung. Mulai dari Surabaya kita memperkenalkan 'koin perubahan,' warga yang bergabung diminta menyumbang kepada calon 1000 perak dengan tujuan dua hal: *pertama*, melawan politik uang dengan cara pemilih tidak menerima uang sogokan dari calon; *kedua*, koin seribu perak adalah simbol amanat pemilih kepada calon, jika nanti dia menjadi pejabat publik, dia bertanggungjawab kepada warga khususnya yang miskin dan telah memberikan suaranya, bukan kepada bohir seperti pengusaha atau partainya. Kampanye koin perubahan juga dilakukan pada pilkada Jakarta 2012 ketika mendukung Jokowi-Ahok. Terus 2014 dengan Jokowi dan menang juga. Dan terus yang terakhir yang kemarin ini, Anies-Sandi.

L: Kenapa kontrak politik dibandingkan dengan masuk dalam struktur tadi?

G: Alasannya begini. Kontrak politik itu secara posisi kita itu menjadi setara dengan si calon. Kita itu maksudnya rakyat. Kalau masuk dalam struktur mereka, artinya rakyat itu menjadi di bawah. Di analisis posisi, ini yang disadari UPC. Kalau masuk itu artinya menjadi bagian

dari skrup-nya dong kita ini di antara mereka. Dan kita tidak ada negosiasi apapun, karena hanya menyukseskan. Kalau ini kita menjadi setara dan kita tidak menjadi bagian dari tim sukses mereka. Ini manajemen yang berbeda juga. Lalu yang kedua, konteksnya itu waktu 2007, perpecahan di level rakyat miskin kota. Jadi reformasi pemilihan secara langsung ternyata dampak buruknya itu menimbulkan perpecahan di kalangan bawah. Jadi si A berkubu kemana, si B berkubu kemana dan tidak jarang terjadi pertikaian, macam-macam begitu. Dengan kata lain, individu-individu RMK menjadi kontraktor politik untuk kepentingan sesaat misalnya, menerima sejumlah uang, dengan nominal tertentu untuk satu KTP, dan sebagainya. Itu dengan kontrak politik menyatukan. Jadi bukan soal saya senang kubu ini-kubu ini. Dengan kontrak politik bisa menyatukan. Karena apa bisa menyatukan? Ikatannya berubah, atau motif yang menyatukannya berubah. Kalau tadinya itu idola, lalu menjadi lebih rasional, program. Apa yang didapatkan? Kedua, yang tadinya sembako atau uang, paling satu hari dua hari habis. Ini lebih dinaikkan lagi: program. Paling tidak lima tahun. Tapi jika terjadi perubahan dalam lima tahun, bisa selamanya. Lalu mendorong kontrol, karena ini janji kan urusannya. Si calon menjanjikan kepada warga. Ketika dia jadi, ini mendorong warga untuk nagih. Dulu dia pernah janji begini-begini. Itu nancap betul. Dan orang punya dokumen yang bisa dilihat. Yang hanya ngecap begitu, bisa ilang dan gak bisa dibuktikan. Nah karena

ada bukti dokumen, orang lalu mendorong. Paling tidak mempertanyakanlah. Dulu janjinya begini, ini ada buktinya. Paling tidak ya mempertanyakan. Yang 2007 itu, paling tidak ke situ. Belum memikirkan bagaimana supaya kontrak itu betul-betul terjadi. Belum! Karena itu juga eksperimen pertama. Jadi bagaimana fokusnya waktu itu mengumpulkan suara, merumuskan program, mengajukan, lalu memenangkan. Tapi begitu ini menang, karena 2007 itu kebetulan juga kalah, 2012 waktu itu begitu menang, itu belum terdisain dengan bagus. Nah itu kenapa pilihannya kontrak politik. Bukan hanya sekedar mencari kekuasaan. Bahkan dari sejak yang menang itu 2012, 2008 di Makassar itu menang, 2014, tidak ada sejarahnya orang UPC atau komunitas itu masuk dapat jabatan tertentu, itu tidak. Karena memang tidak diniatkan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena berbeda dengan partai politik, perjuangan UPC adalah memberikan kekuasaan di tangan rakyat yang terorganisasi dan berkesadaran politik yang kritis. Tetapi itu yang mungkin menjadi hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, apakah perlu orang dari dalam untuk mengawal kontrak politik.

L: Apa kira-kira pembeda kontrak politik yang terakhir ini dengan yang banyak sebelumnya?

G: Kalau tujuan yang pertama itu tetap ya. Nah tambahannya itu, kita mencoba memasukkan tambahan bagaimana kalau janji itu dilanggar? Makanya kita desain, sebenarnya bukan kontrak politik tapi

perjanjian. Makanya di naskahnya bukan kontrak politik, tapi perjanjian. Kontrak politik itu hanya bahasa untuk publikasi. Untuk umum supaya gampang dimengerti. Tapi sebenarnya perjanjian itu mengacu ke KUH perdata, terkait hukum perjanjian atau hukum perikatan. Nah, KUH perdata itu kan mensyaratkan beberapa hal terkait perjanjian, walaupun secara KUH, perjanjian lisan pun termasuk sah, tetapi akan repot di pembuktian di pengadialan jika terjadi sengketa. Nah, paling tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, lalu ada hal yang diperjanjikan itu jelas, lalu pihak-pihaknya juga jelas subjek hukumnya, lalu yang terakhir itu hal yang diperjanjikan itu kausal yang halal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bedanya di situ. Jadi isi kontraknya pun yang sebelum-sebelumnya dengan yang sekarang itu berbeda. Sebelum 2017, kontraknya itu sangat bersifat umum. Contoh yang di 2012 itu, penataan bukan penggusuran. Geser bukan gusur. Legalisasi kampung-kampung yang sudah menempati 20 tahun. Pelibatan rakyat dalam penyusunan peraturan tata ruang. Itu kan umum? Umumnya, karena subjeknya ini siapa? Kalau umpama pelibatan rakyat dalam penyusunan tata ruang, nah rakyat ini siapa? Kan banyak sekali, anggota DPR-pun juga rakyat! Nah, dalam hukum perjanjian tidak bisa, yang namanya subjek hukum berarti dia individu atau badan hukum. Nah kalau individu dia punya nama, dan kalau dikait dengan pilkada, dia punya hak pilih. Termasuk hal yang diperjanjikan itu juga jelas. Waktu itu kampung

yang mana juga tidak terlalu jelas yang dimaksudkan untuk seluruh Jakarta. 2012 ke bawah, kontrak ini milik seluruh warga Jakarta dan berlaku untuk seluruh warga Jakarta. Itu ternyata risikonya kemudian, ketika terjadi pengingkaran, sudah bisa ditebak bahwa tidak akan bisa digugat di pengadilan. Karena pernah ada satu contoh, si Boni Hargens itu pernah menggugat SBY. Yang digugat visi-misinya terkait pertumbuhan ekonomi. Ternyata itu tidak terjadi. SBY hampir turun tidak jadi [pertumbuhan ekonomi sesuai visi-misi]. Digugat oleh Boni Hargens. Oleh pengadilan akhirnya ditolak. Karena visi pertumbuhan ekonomi itu variabelnya banyak dan itupun terkait juga dengan kondisi global, artinya hal yang diperjanjikan itu tidak terlalu spesifik, terlalu umum. Nah kita pikir akhirnya pasti ditolaklah. Nah kalau menggugat dan ditolak itu akan menjadi preseden buruk. Lalu itu yang kemudian mendasari ada perubahan. Mesti detail betul. Makanya ketika menyusun isinya itu ada tim memang yang menggodok. Maksudnya kita ada batasan-batasan, sebelum ada pemutusan itu, ada dua pihak, ada tim pakar, ada tim warga. Jadi ada diskusi di warga untuk menentukan usulan-usulannya apa saja. Lalu dikaji sama tim pakar. Dikaji secara hukum, dikaji secara tata ruang, pertanahan, macam-macam gitulah. Terus masukan-masukan ini dibawa lagi ke warga. Ada perubahan begini-begini. Nah, akhirnya disepakati. Ini hati-hati betul nyusunnya supaya tidak ada satu peraturan yang dilanggar. Jika ada satu peraturan atau hukum yang dilanggar, maka perjanjian itu batal demi

hukum. Artinya batal secara otomatis. Itu beda satu ya, terus yang kedua, ada hal yang diperjanjikan juga dari warganya. Kalau dulu tanggungjawab warga adalah memberikan sejumlah suara sesuai kesepakatan. Misal Makassar, kita menjanjikan 70 ribu suara yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan tandatangan pemilih pendukung. Penting dicatat, kontrak politik 2017 bukan perbaikan dari kontrak-kontrak politik sebelumnya, tetapi model yang berbeda.

Sekjen: Dalam kontrak itu juga tercantum, jika salah satu kampung/TPS kalah, perjanjian itu batal semuanya.

L: 125 TPS?

G: Iya. Itu resikonya. Tapi mau tidak mau itu kita cantumkan. Karena perjanjiannya ada dua hal yang dipertukarkan. Apa nih? Mau tidak mau kita cantumkan TPS itu.

L: Dan dari warga usulannya spesifik untuk masing-masing kampung, atau kelompok ya, karena tidak semua kampung kan?

G: Iya.

L: Saya ingin bertanya tentang proses pengorganisasiannya; persisnya apa yang dilakukan oleh JRMK-UPC supaya bisa sampai 31 entitas; 26 kampung, Sebaja [Serikat Becak Jakarta], 3 PKL [Pedagang Kaki Lima], 1 rusun [rumah susun]; solid dalam kontrak itu, apa yang dilakukan dalam

prosesnya?

G: Nah, dalam proses kerja ini, berubah, terus terang. Dulu itu untuk melakukan rap, sumber daya tenaga dan orang itu butuh banyak banget. Misalnya uang. Tapi sekarang UPC sudah tidak berdonor. Jadi strategi berubah.

L: Oke. Kira-kira kalau dibikin nilai antara 1–10 skalanya, berapa kira-kira nilainya kuantitas warga untuk yang aktif atau intens di organisasi? Kalau dibandingkan dengan seluruh jumlah anggota JRMK yang ikut kontrak politik?

G: Ini berlapis, jadi ukurannya berbeda. Lapis pertama pengurus JRMK nih, karena mereka juga bagian dari warga dari 31 [entitas] itu. Ada pengurus JRMK, ada CL, *community leader* kampung [Kader kampung], lalu tim di kampungnya sendiri, yang belum tentu pengurus di JRMK, nah ini levelnya beda-beda. Nah, pengurus JRMK itu menjadi fasilitator untuk CL. CL itu menjadi fasilitator tim di setiap kampung. Nah, kondisinya juga beda-beda, ada yang terorganisir, ada juga yang serampangan, ada juga yang tidak terlalu aktif juga, beda-beda. Jadi aku bingung juga harus ngasih nilai. Tapi levelnya begitulah kira-kira.

L: Pertanyaannya aku ganti, kalau JRMK ini rapatnya berapa kali dalam seminggu menuju kontrak politik itu, atau tiap hari?

G: JRMK itu rutinnya satu minggu sekali koordinasi. Tapi ketika untuk kontrak politik itu tidak terhitung lagi. Itu sudah dalam seminggu bisa 3–4 kali, kadang siang, kadang malam. Udah tidak terhitung lagi.

L: Tapi kan mereka lumayan berjauh-jauhan ya kampungnya, berjarak?

G: Kebetulan dekat, ya seputaran sinilah, Penjaringan, penggerak-penggerak. Kecuali Andy, ya tapi masih terjangkau lah. Apalagi masih muda, belum ada buntutnya. Tapi sebentar, ini tidak hanya ngorganisir yang kampung ya, ini juga mengorganisir yang kelas tengahnya ini, di kontrak politik ini.

L: Yang mana ini?

G: Ya tim pakar itu.

L: Oh, oke. Siapa yang menggarap tim pakar ini?

G: Itu di aku. Kalau di JRMK-nya aku menggarap pengurus JRMK. Pengurus JRMK menggarap CL. CL menggarap tim. Tim menggarap warga. Jadi berlapis begitu. Walaupun, ya kadang-kadang diperlukan aku ikut pertemuan sampai level kampung. Kadang begitu. Tapi untuk yang luar ini, tim pakar ini di aku.

L: Dan mereka bertemu intens juga?

G: Ya, waktu itu. Walaupun tantangannya agak berbeda. Karena mesti orang-orang yang sudah punya lembaga sendiri. Sudah punya lembaga sendiri, kesibukan sendiri,

pekerjaan sendiri, kemudian mencoba dikumpulkan, memberi kontribusi. Latar belakang ya beda-beda. Tapi ya tidak baru-baru amat sih, jadi relasi pertemanan itu cukup membantu.

L: Di tim yang ada sekarang, mereka yang di kampung-kampung itu, di entitas itu, sistemnya sudah sampai mana, apakah itu sudah punya iuran sendiri atau beberapa punya atau tidak?

G: Kamu bedakan iuran dan saweran tidak?

L: Apa bedanya?

G: Kalau iuran itu rutin, kalau saweran itu insidental. Nah, kalau di JRMK sebenarnya sudah ada mekanisme iuran bagi kelompok-kelompok usaha bersama yang waktu itu dapat pinjaman modal. Itu ada mekanisme iuran mingguan. Satu bulan itu 3 ribu atau seribu aku lupa. Tapi khusus untuk kontrak politik ini tidak ada iuran. Jadi itu gampangannya begini, untuk kegiatanmu, kebutuhanmu, kamu butuhnya apa, siapin sendiri.

L: Ada tips khusus bagaimana menjaga suara itu dan meyakinkan orang dengan perjanjian itu, bahasa apa yang paling cepat orang menangkap?

G: Tanah. Legalisasi tanah itu yang paling cepat. Tapi bahasanya bukan menolak penggusuran. Kalau itu bisa kita bayangkan akan ada penolakan. Karena sifatnya, lah emang mau digusur? Dapat informasi dari mana? Kan jadi aneh. Jadi lebih positif bahasanya. Sudah tinggal di

sini berapa tahun? Terus status tanahnya bagaimana? Ini ada peluang, kenapa kita tidak ngajuin? Anies sudah janji banyak ini, tapi soal tanah kita mana? Gak ada! Iya kan? Gak ada? Jadi tanah itu yang jadi menarik. Lalu kita ngomong, kontrak politik kali ini berbeda. Kalau tidak terlibat, tidak masuk dalam kontrak politik, artinya tidak bisa menuntut secara hukum. Ya bisa jadi semua ikut merasakan program ini, tapi jika tidak terjadi di tempatmu kamu tidak bisa menuntut. Yang membedakan di situ.

L: Itu yang masalah legalisasi tanah berarti ya, atau saling menyambung sebenarnya itu dengan tata ruang, bagaimana?

G: Nyambung, kita sudah pelajari di kampung-kampung sasaran itu. Kita cek di tata ruang.

L: Secara umum bagaimana ceritanya soal legalisasi dan tata ruang itu?

G: Jadi, si fasilitator tadi, sebelum turun kampung, kita sudah pelajari dulu. Di perda zonasi itu kan ada tuh, kampung ini-kampung ini… Kita cek, kita *crop*, kita *print*. Masalah itu bisa menjadi peluang kan buat pengorganisasian. Masuknya lewat situ. Nih buktinya. Kalau jelek artinya kita dorong untuk mengubah jadi baik sesuai permukiman. Tapi kalau baik kita dorong tempatmu. Peruntukanmu sudah cocok, artinya punya peluang untuk ngurus soal tanahnya. Nah kalau warganya tidak gerak, ya tidak akan mengubah

apapun. Tidak akan terjadi perubahan. Nah, jadi mereka senjatanya itu juga. Jadi tidak hanya ngomong, tapi juga bawa zonasi dan bawa informasi soal status tanah itu.

L: Maksudnya, status tanah adalah bukan hak milik di kampung-kampung itu, dan di dalam kontrak politik itu yang mau dilegalkan menjadi hak milik?

G: Iya, salah satunya. Hak pakai.

L: Dan perbedaannya bagaimana? Hak pakai ke hak milik bagi orang kampung itu bagaimana?

G: Respon mereka? Ya awalnya menginginkan hak milik. Tapi waktu itu kita ajak realistis sajalah. Bahwa kalau langsung hak milik, pilihannya begini, yang kita cari ini sebenarnya apa sih? Apakah keamanan tinggal? Ataukah kita ingin berinvestasi? Nah, mayoritas menginginkan keamanan tinggal. Kalau keamanan tinggal, lalu milih mana? Lebih baik tuntutannya kita turunkan sedikit, tapi peluang keberhasilannya gede, atau kita ngotot yang paling tinggi tapi peluang menangnya kecil? Ya pada akhirnya memutuskan oke. Awalnya HGB yang disepakati, tapi dari pihak Anies, tim hukumnya lalu mengusulkan hak pakai. Ya itu akhirnya keputusannya begitu.

L: Kenapa hak pakai menjadi rasional bagi warga itu? Naiknya dari apa ke apa? Sehingga rasional?

G: Titik komprominya itu bahwa, hak pakai itu dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Jadi kita bertahap, yang

penting kita kunci dulu dasarnya bahwa sudah beralih dulu nih, dari yang kosong gak ada hak menjadi hak. Ada statusnya, ada hak. Dari yang terlarang, ilegal menjadi terdaftar. Ahok itu kan sebenarnya bilang ilegal, liar, itu kan dari sisi tanah sebenarnya. Ya gak punya surat tanah, ilegal dan liar. Ya keinginan orang itu pasti tinggi, tapi bagaimana kita merealistiskan. Karena kalau ketinggian juga, itu kalau tidak dapat, bahaya juga itu buat gerakan. Orang bisa putus asa itu. Dan itu yang menjadi titik kompromi. Akhirnya timnya Anies setuju. Aku merasa di titik itu akhirnya kita ketemu dengan timnya Anies. Semangatnya ini bukan bagi-bagi tanah. Rezimnya Anies semangatnya, jadi kita sampaikan bahwa kita tidak bermaksud pemerintahan ke depan itu, tidak istilahnya itu bagi-bagi tanah. Tetapi tanah dimaknai sebagai asas kemanfaatan. Selama ini toh warga sudah memanfaatkan, tetapi tidak ada jaminan keamanan.

L: karena tata ruang bukan pemukiman?

G: Karena tata ruang bukan pemukiman. Yang kedua juga tidak ada sepucuk surat pun yang jadi pegangan. Padahal sudah jadi penggarap. Jadi, *tagline* kita tanah untuk penggarap. Itu karena dasarnya warga menjadi penggarap. Lalu yang kedua, tanah dimaknai sebagai kemanfaatan, bukan menumpuk kapital itu lho. Sehingga yang kita usulkan hak pakai, karena apa? Rumah sebagai tempat tinggal juga sebagai ruang usaha, nah di sana ketemunya. Lalu dengan memberikan hak pakai kepada warga, pemerintah sebenarnya sedang berusaha

mengembangkan kehidupan warganya, karena lalu bisa dimanfaatkan sebagai usaha. Dan selanjutnya juga koperasi, jadi hak pakai itupun diatasnamakan koperasi, bukan atas nama individu-individu.

L: Jadi hak pakai itu diatasnamakan koperasi?

G: Itu juga yang memperkuat mereka di tim Anies bahwa ini memang niatnya untuk pengembangan kesejahteraan, bukan untuk bagi tanah lalu jual-beli. Karena itu juga sempat disinggung juga. Nanti khawatirnya bagaimana mengontrol orang memperjual-belikan tanah setelah mereka dapat legalitas?

L: Oke, legalisasi, aku bisa lihat kaitannya dengan tata ruang.

G: Itu kayak jadi prasyarat gitu lho. Itu bisa dilakukan kalau tata ruangnya sudah sesuai. Maka tata ruang kita tempatkan di posisi pertama. Nah penataan nomor tiga bisa dilakukan kalau legalisasinya jelas, tanahnya *clear and clean*. Itu bahasa mereka. Jadi itu saling terkait gitu lho antara satu-dua-tiga. Dan itu menjadi satu paket. Tidak hanya bisa berhenti di poin kedua, poin ketiga itu juga harus.

L: Poin program hunian terjangkau untuk rakyat miskin ini munculnya dari mana?

G: Itu sebenarnya isinya rusunawa ke rusunami.

L: Kalau yang perizinan usaha untuk paguyuban

PKL itu?

G: PKL sebenarnya sudah ada ruang usaha. Mereka kan masih dikejar-kejar itu pengasong. Nah, kunci utama di kaki lima ini izin usaha minimal sepuluh tahun supaya ada jaminan gitu lho berapa lama dia harus berusaha.

L: Jadi sepuluh tahun minimal?

G: Iya. Jadi sepuluh tahun minimal. Dan ada kontrak jelas gitu lho. Karena sekarang tidak punya lho mereka sekarang. Bahkan mereka direlokasi, dan sudah bayar duit.

L: Bisa digusur sewaktu-waktu ya?

G: Iya, bisa digusur sewaktu-waktu, padahal bangunan milik mereka karena mereka bayar.

L: Kalau yang Sebaja ini, bantuan alih profesi untuk tukang becak?

G: Ya, itu kompromi juga. Karena sebenarnya tukang becak, teman-teman itu maunya itu perda-nya yang diubah. Dan itu berat karena harus melibatkan DPRD. Dan itu dikhawatirkan, kalau itu dimasukkan ke dalam kontrak politik, artinya itu di luar kewenangan gubernur, dan mengganggu asas legalitasnya perjanjian itu. Karena di luar kewenangan kan gitu. Lalu yang kita masukkan alih profesi. Tapi alih profesi ini kita maknai tidak harus, karena kan itu kewajibannya si gubernur untuk membantu alih profesi, bukan kewajibannya

tukang becak harus alih profesi. Jadi strateginya selama alih profesi itu belum selesai, ya jangan digusur. Dengan kata lain sebenarnya tidak ada *garukan* becak. Lalu ada santunan di situ. Santunan untuk tukang becak. Karena itu kita tangkap dari janjinya Anies terkait Kartu Jakarta Lansia. Nah, teman-teman tukang becak ini tidak pernah dapat program-program kayak gitu, dan banyak sekali lansia tukang becak masih narik. Nah, itu gimana juga supaya bisa mengakses program itu.

L: Oke. Kemudian aku pingin menghubungkan isi kontrak itu dengan isu yang lebih besar di Jakarta seperti banjir. Salah satu alasan gusuran itu kan normalisasi ya, kayak Bukit Duri. Hubungannya bagaimana? Kalau hunian-hunian itu dipertahankan, dengan program-progam penanganan bajir seperti yang lalu, itu kan kontradiktif. Ide macam apa yang ditawarkan sehingga ide itu bisa diterima dalam hal isu besar di Jakarta seperti banjir?

G: Ide yang mau kita tawarkan itu sebenarnya, solusi itu tidak tunggal. Kalau sebelumnya itu solusi itu tunggal "rusunawa". Yang kita tawarkan itu ide tidak tunggal. Solusi tidak tunggal. Makanya itu poin ketiga soal penataan itu. Itu yang masuknya nanti di situ. Terkait banjir, terkait sampah, terkait kegiatan sosial, terkait ekonomi, semua masuk di situ. Jadi penataan itu tidak hanya fisik, tapi bisa ekonomi, kegiatan sosial. Nah umpama terkait dengan banjir, nyambungnya di situ. Kemudian dikembangkan. Di soal penataan, itu harus

berperspektif yang sensitif terhadap air. Sehingga dia punya kontribusi dalam mengurangi banjir. Jadi model, karena dari 26 kampung ini kategorinya macam-macam, ada yang di pinggir kali, ada yang di waduk, ada yang di rawa, ada yang di pinggir laut, ada yang di daratan. Nah ini kalau berhasil dilakukan penataan dengan mempertimbangkan solusi lokal, ini bisa menjadi model untuk kampung-kampung lain di Jakarta.

L: Contoh ide solusi lokal yang sudah jalan atau yang tergambar bagaimana?

G: Ya di sini contohnya, walaupun belum selesai ya. Contoh, warga pinggir kali itu selalu diidentikkan selalu berkontribusi dalam sampah penyebab banjir. Dari sini sudah kita buktikan bahwa, warga diberi kesempatan, warga bergerak, itu bisa memberikan perubahan.

Sekjen: Membuktikkan bahwa justru warga itu bisa merawat sungai.

L: Merawat sungai itu artinya tidak membuang sampah di sungai, terus?

Sekjen: Membersihkan sungai.

L: Terus apa lagi Pak Sekjen?

Sekjen: Dari pengolahan sampah saja ya, kalau khususnya yang di komunitas ya, itu 60–80% pengurangan sampahnya.

L: Satu kampung?

G: Individu. Karena yang tadinya hanya mengelola sampah dalam arti sampah yang tadinya membuang di kali, buangnya di tempat sampah, diangkut ke Bantar Gebang. Itu masih bermasalah, ini diubah lagi, mengurangi bukan memindahkan. Sebenarnya strategi 3 pintu itulah yang sangat menarik sebagai satu contoh tidak membuang sampah lagi di lingkungan. Strategi 3 pintu adalah strategi yang dikembangkan *LabTanya* [konsultan arsitektur dengan program "Kota Tanpa Sampah"] untuk mengurangi sampah. Pintu 1 mengurangi sampah masuk ke rumah atau kampung, pintu 2 mengurangi timbulnya sampah, pintu 3 mengolah hasil sampah yang masih ditimbulkan. Kalau itu bisa dilakukan di lingkungan, itu bisa mengajak yang di luar lingkungan itu dalam mengurangi sampah. Contoh kita belanja di pasar tidak bawa plastik, dari rumah kita bawa jinjingan itu.

L: Jadi pengurangan sampah secara individu itu bisa sampai 60%-80%?

G: Jauh lho 80% itu!

L: Iya jauh sekali.

G: Ide penataan di kontrak politik itu, memang pengembangan dari tiga kampung sini inspirasinya. Dalam arti *scale up* dari tiga ini meluas ke 26. Kalau 26 ini berhasil, diperluas sampai tingkat kota. Ide dasarnya di situ. Jadi tidak berhenti di sini. Itu tadi ya, penataan tidak hanya fisik tetapi juga non fisik. Lalu penataan

ini juga masuk dari berbagai perspektif. Banjir, agraria, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Itu ya contohnya. Jadi kebanyakan wilayah banjir. Nah, tetapi solusinya kemudian harus berdasar lokalitas. Jadi kemudian dikembangkan. Tidak tunggal gitu lho. Sesama pinggir kali mungkin berbeda. Jadi hasilnya kemudian dapat pola. Termasuk kemudian agragianya ya. Apakah di sini cocok konsolidasi lahan, apakah disini cocok relokasi, apakah geser, potong, itu lokalitas banget.

L: Sejauh ini apa yang dilakukan untuk menjaga kesolidan JRMK yang 31 itu?

G: Pakai pendataan. Jadi sebenarnya judulnya itu pendetailan usulan. Karena yang waktu kontrak itu kan usulan umum, seperti perubahan tata ruang kan sudah cukup jelas ya, legalisasi. Tapi kan untuk legalisasi itu siapa? Buktinya apa? Bentuk tanahnya, sejarah tanahnya kayak apa? Terus nama-nama orangnya ini siapa-siapa? Berapa KK yang akan mendapatkan? Berapa luasnya? Lalu penataannya akan model seperti apa? Usulannya kayak apa? Itu yang kemudian dipakai untuk menggerakkan warga. Untuk membuat usulan kan harus berbasis data, tidak sekedar keinginan semata. Termasuk tidak hanya program penataan. Program-program lain seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, itu termasuk. Makanya harus berbasis data. Semua kumpulkan data dulu. Sebar formulir. Nah, di situ ada latihan bagaimana mengisi formulir. Bagaimana

menginputnya. Nah, bagaimana itu jalan di lapangan kita serahkan ke masing-masing kampung. Ada yang cukup terorganisir, membagi peran. Termasuk dana ya. Untuk foto copy itu dari kampung sendiri. Orang yang akan mengisi formulir itu dia yang bayar. Ya pasti ada juga yang mempertanyakan, lha ini kalau program dari pemerintah, pemberdayaan, harusnya mereka yang bayar, kenapa kita fotokopi sendiri? Anies belum dilantik kok pendataan? Ada juga yang begitu.

L: Seberapa siap data itu sekarang?

G: Saya nanti kasih lihat formulirnya. Nah formulir itu selain untuk kebutuhan itu, ya tapi juga kita kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan indikator kemiskinan. Supaya orang-orang ini bisa masuk pada program pengentasan kemiskinan. Supaya ada cantolan gitu lho. Nah terus bagi kertas. Terus mereka fotokopi sendiri. Habis itu inputnya pakai *google form*. Jadi di setiap kampung dibentuk tim. Anak-anak muda begitu. Lalu setelah warga kumpulin, mereka *input* pakai hape. Jadi terpantau itu data yang masuk sudah seberapa sih, nanti saya bisa tunjukin. Terus ada diskusi selain formulir. Lalu ada diskusi soal tanahnya dengan tim *lawyer*. Mbak Vera di Aquarium, Andika sama Rizki di sini, di tempat kampung sini ngobrolin soal sejarah tanahnya, dokumen apa yang dipunyai, terus persiapan apa lagi yang harus dilakukan. Contoh diskusi di sini ada diskusi dua jenis ya. Diskusi jenis kegiatan sama diskusi sejarah soal tanahnya. Ide-ide kegiatan itu, karena waktu itu si

timnya Anies kan sedang menyusun APBDP, mau gak mau kita harus masukin lebih dulu ide-ide keinginan secara fisik ya. Tetapi secara komplit belum, hanya mengisi kegiatan. Kayak perbaikan jalan, perbaikan rumah, pembuatan taman, begitulah. Nah dari usulan sini dibahasakan sama tim pakar. Di tim pakar lalu masukin form, lalu masukin ke tim Anies.

L: Dari diskusi-diskusi pertanahan ini, ada terobosan hukum yang menarik gak, ada ide yang muncul gak, yang dirasa, baru, menarik, penting?

G: Yang baru adalah pemberian informasi konkret dan detail tentang fokus isu kepada warga, sehingga langkah tersebut menjadi pendorong warga bergerak, mempunyai harapan, mengorganisasikan diri, dan menjadi kritis. *Well-informed*. Sebagai contoh, warga menjadi tahu soal RTRW dan RDTR, bisa bicara rinci dan akurat soal tersebut, dapat memberikan usulan sesuai kebutuhan mereka. Kita pelajari tata aturannya itu. Justru secara aturan itu warga sudah terjamin bisa dapat tanah, tetapi selama ini terjadi pembohongan gitu lho, atau dikaburkan. Contoh begini, pertama soal definisi tanah negara, lalu yang kedua, apakah tanah negara bisa menjadi milik dari warga? Lalu, bagaimana syarat-syaratnya? Itu kan ternyata sebenarnya secara aturan tidak sulit-sulit amat. Tanah negara sudah terjadi pembiasan, bahwa tanah negara itu artinya kan tanah pemerintah. Itu kan keliru. Secara definisi di dalam aturan UUPA, di pendaftaran tanah, di PP HGB, HGU

dan hak pakai, itu ternyata gak benar sama sekali. Itu istilahnya tanah bebas. Lalu yang kedua, tanah negara bisa enggak menjadi tanah milik? Itu juga sudah sangat gamblang, bisa. Bahkan tanah pribadi, tanah HPL bisa ditempelin dengan hak pakai, bisa ditempeli dengan HGB. Syaratnya juga sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau pemerintah bilang tidak bisa, itu bohong karena di aturan jelas. Mau dibikin sertifikat pun sebenarnya bisa. Buktinya apa, ya kan dituliskan juga soal ada girik, ada gini-gini, tapi juga data yuridis yang lain. Alas haknya itu, sebenarnya kalau tidak ada, namanya juga tanah negara, artinya tidak ada alas haknya kan, artinya ada penguasaan fisik. Dan sudah ditulis ada pasalnya, prioritas bagi yang menguasai. Jadi kalau tanah negara mau ditempelin hak, yang diprioritaskan adalah orang yang menguasai tanah itu.

L: Itu yang disebut penggarap?

G: Itu yang disebut penggarap! Lalu kemudian data yuridis yang dibutuhkan ada akte pelepasan tanah. Pelepasan kita runut lagi, ke siapa nih. Pelepasan kalau tanah negara ke hak pakai itu setingkat menteri atau yang ditunjuk. Tak lacak lagi siapa pejabat yang ditunjuk, ternyata wali kota. Wali kota cuma cukup bikin SK atau penentuan lokasi pendaftaran tanah. Gitu saja sudah jadi. Artinya itu sebenarnya tinggal *political will*-nya pemerintah saja gitu. Bukan soal gak bisa itu menurutku. Bukan hal baru, karena sudah diatur, tetapi tidak banyak diketahui warga.

L: Kalau ada kelompok warga miskin kota di luar jaringan JRMK yang 31 entitas itu nanti mau gabung bagaimana?

G: Secara itu gak masalah, jujur kita mendapat kawan baru, justru itu gak papa. Justru memang dimaksudkan sebagai sarana memperluas basis.

L: Tapi ada mekanisme yang disiapkan, apakah pernah dibicarakan di tingkat 31 entitas itu, kalau ada kelompok lain yang gabung?

G: Gabung ya di BLUD. Badan layanan umum daerah itu. Maksudnya tentu kalau kontrak itu hanya berhenti pada 26 kampung 31 wilayah ini, sangat eksklusif banget jadinya, oleh karena itu tidak ada perubahan sisitem akhirnya. Nah untuk mengantisipasi itu akhirnya kita usulkan untuk bikin badan khusus soal kampung. arena kayak dinas perumahan dan PU itu urusannya masih campur. Antara bisnis perumahan dengan pelayanan perumahan masih campur. Jadi mereka sendiri gak bisa bedakan mana yang bisnis, mana yang pelayanan. Jadi penting sekali ada badan pelayan yang khusus ngurusi kampung. Salah satu alternatif jenis badan yang memungkinkan, yaitu BLUD, itu kita usulkan dulu. Tapi untuk badan pelayanan. Mirip sekali dengan CODI. Jadi kita ambil contoh CODI Thailand. Itu yang akan mengurus khusus soal kampung. Nah sebagai langkah awal untuk pembentukan, 26 kampung ini, ya maksudnya anggaplah sebagai proyek pertama. Dari situ supaya ketahuan nih, jenis-jenis aktivitasnya seperti apa, tenaga-tenaga

yang dibutuhkan, anggaran yanag dibutuhkan, produk hukum yang dibutuhkan, supaya nanti ketika sudah ketahuan ini, baru dibentuk lembaganya. Nah lembaga ini kemudian tidak ada lagi kontrak politik. Jadi seluruh kampung yang punya niat untuk penataan, legalisasi, datanglah ke BLUD itu. Tanpa harus menjadi bagian dari JRMK. Tanpa harus didampingi oleh UPC atau Rujak. Tanpa harus didampingi UI gitu. Jadi membuka akses untuk seluruh kampung.

L: Ini pertanyaan soal organisasi. Di banyak organisasi rakyat, ada banyak kasus elit-elitnya itu kemudian membusuk, dalam artian misalnya masalah tanah, pengurus-pengurusnya ngambil *fee*. Pernah dibicarakan tidak di JRMK, kalau pernah, misalnya mekanisme apa yang disiapkan untuk mengantisipasinya?

Sekjen: Kalau di kita kan ke depannya akan dibuat anggaran rumah tangga koperasi itu. Jadi koperasi itu sudah ada aturannya. Untuk mengantisipasi khususnya para pengurus-pengurusnya itu. Dan masyarakat kan juga bisa mengontrol, supaya menjaga orang itu jangan menyeleweng dari kesepakatan bersama. Kita harus transparan. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Keputusan itu berdasarkan musyawarah. Itu penting. Jadi pengurus itu tidak sewenang-wenang, karena berdasarkan musyawarah itu.

L: Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah?

Sekjen: Iya, berdasarkan musyawarah.

G: Ini penting, yang dibilang Sekjen itu. Kuncinya informasi. Bahwa contoh mengurus sertifikat ini prosedurnya bagaimana, biayanya berapa? Nah, itu harus diinformasikan sejak awal dan tertulis. Tidak boleh hanya dengan lisan. Kalau lisan bisa berkembang, bisa berkurang, kebanyakan berkembang. Jadi harus tertulis. Terus yang kedua idealnya ya tim bukan dikerjakan sendiri atau segelintir orang. Itu musti dipastikan sejak awal itu. Mesti ada tim kerja yang melibatkan banyak orang dan banyak segmen, laki-laki, perempuan, muda, tua. Itu yang menjadi kontrol. Jadi peran dan informasi, itu yang menurutku basisnya untuk mengantisispasi. Kalau semakin banyak yang berperan semakin banyak yang tahu. Kalau semakin banyak yang tahu, artinya tidak bisa dibohongi. Kalau semakin banyak orang tahu, ya semakin takutlah orang itu berbuat curang begitu.

L: Kalau perempuan, sejauh ini bagaimana keterlibatannya di dalam JRMK?

G: Kamu tahu sendiri sebagian besar penggerak JRMK perempuan.

L: Itu kok bisa begitu?

Sekjen: Karena perempuan itu kebanyakan ada yang di rumah, itu yang pertama. Kedua, karena mereka banyak waktu. Juga karena mereka yang lebih responsif ketika diajak bicara tentang masalah kampungnya. Karena

mereka yang sehari-hari menangani dan mengatasi permasalahan di rumah tangganya dan yang terkait kampung.

L: Oh jadi semakin aktif di organisasi?

Sekjen: Ya itu. Kalau suaminya kerja kan. Yang cari duit. Mereka setelah masak kan bisa nyambi berorganisasi. Karena organisasi itu kan di wilayah masing-masing.

G: Tapi ada hal lain juga yang aku lihat ya. Perempuan juga lebih aktif dibanding laki-laki di JRMK, itu yang aku lihat. Tingkat solidaritasnya itu cukup tinggi perempuan dibanding laki-laki. Sehingga lebih ringan tangan dibanding laki-laki. Membantu untuk saling berbagi dengan yang lain, itu yang aku lihat ya, lebih mudah di perempuan. Sehingga ketika kita minta atau kita dorong ke tempat lain, ketemu orang lain itu lebih cepat dibanding laki-laki. Laki-laki kadang itung-itungannya banyak. Gak semua ya, tapi lalu itung-itungannya *njelimet*. Ada ongkos lah. Ada makanlah. Walaupun sudah tau, semua itu gak ada. Itu kadang-kadang yang tidak jalan. Selain juga musti punya tanggung jawab pertama tadi, cari nafkah ya. Tapi banyak juga di kita perempuan yang cari nafkah.

L: Mereka mainkan fungsinya di organisasi juga ya?

G: Iya, ya itu gak ada angkanya gitu ya.

L: Tapi kira-kira dari jaringan yang bergerak aktif berapa persen laki-laki, perempuan?

G: Sebagai penggerak ya? Di atas 60% itu perempuan. Bahkan yang di tingkat fasilitator itu cuma dua, Andi dan Pak Warno. Kan Andi baru ya, dulu cuma satu laki-lakinya.

L: Bisa muncul begitu itu bagaimana caranya?

G: Ya itu tidak terkatakan ya. Itu lalu disadari dari proses, bahwa ternyata perempuan juga bisa berorganisasi, perempuan bisa mengambil peran, perempuan tidak hanya di rumah, itu dari proses yang berjalan gitu, tidak dalam arti pendidikan kelas gitu.

L: Pertanyaan terakhir; dari semua ini, menuju pilkada serempak 2018 di banyak tempat, apa rekomendasinya untuk, atau refleksi apa yang bisa disampaikan pada gerakan rakyat di tempat lain?

Sekjen: Ya untuk saran khususnya yang ke depan pemilihan secara langsung, satu, masyarakat itu jangan terkena isu adanya agama maupun ras, karena itu akan memecah belah. Tapi kalau mau melihat calon itu dari program. Itu yang penting. Karena program itu yang akan mengantarkan suksesnya wilayah itu.

G: Aku nyambung si Sekjen ya. Jadi titik beratnya ada di program, bukan soal primordialnya ya. Tetapi program ini juga musti digarisbawahi, program yang berasal dari warga. Jadi bukan program yang dari calon gubernur atau calon kepala daerah datang bawa program. Sekarang peluangnya gede, karena memilih secara

langsung dan suara dibutuhkan. Musti pemilik suaralah yang mengusulkan program, itu satu. Yang kedua, program itu tidak akan bunyi kalau diusulkan masing-masing, maka musti harus diusulkan secara bersama-sama. Maka itu akan menjadikan posisi tawarnya kuat di hadapan para calon.

Sekjen: Program itu dari bawah, dilanjut, diikat dengan kontrak politik.

Biodata Penulis

Bosman Batubara adalah alumnus Jurusan Teknik Geologi UGM (2005) dan *Interuniversity Programme in Water Resources Engineering*, KU Leuven dan VU Brussel, Belgia (2012). Sekarang adalah kandidat PhD yang mendedikasikan separoh waktunya untuk menyelesaikan disertasi dengan tajuk "*Near-South Urbanization: Flows of people, water, and capital in and beyond (post-) New Order Jakarta*" di Water System Science and Governance Department, IHE-Delft Institute for Water Education, Delft, dan Human Geography, Planning and International Development Department, University of Amsterdam. Separoh waktunya yang lain digunakan bekerja sebagai peneliti di jurusan yang sama di University of Amsterdam. Sejauh ini terlibat menulis beberapa buku: (1) Heru Prasetia dan Bosman Batubara (editor dan kontributor) (2010) *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil*. Depok: Yayasan Desantara; (2) Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo (2012) *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: INSISTPress; (3) kontributor dalam Anton Novenanto (penyunting) (2013) *Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo (Sebuah Bunga Rampai).* Kanisius dan MediaLink: Yogyakarta; (4) kontributor

dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (editor) (2015) *#Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Literasi Press: Yogyakarta; (5) Anna Mariana dan Bosman Batubara (penyunting) (2015) *Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu: Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen*. Literasi Press: Yogyakarta; dan (6) Bosman Batubara (penyunting tamu) (2017) *Ekologi Politis Air: Akses, Ekslusi, dan Resistensi*. Journal WACANA 35/Tahun XIX/2017. Insist Press: Yogyakarta. Surel: bosman.batubara@gmail.com.

Revolusi adalah suatu perubahan sosial-ekologis yang dalam hemat saya didorong atau dilakukan oleh orang atau elemen yang berada dalam suatu sistem tapi tidak diuntungkan dari, atau malah justru dirugikan oleh, beroperasinya sistem tersebut.

Dalam kapitalisme model tunggal, karena yang dianggap berperan besar dalam produksi nilai-lebih adalah buruh, maka yang dibayangkan sebagai elan revolusioner adalah buruh. Sebagai elemen yang tidak diuntungkan dari, atau malah dirugikan oleh, beroperasinya sistem kapitalisme, maka, demikian jalan pemikiran ini bergulir, buruh menghendaki perubahan. Buruh menghendaki revolusi. Sementara dalam kapitalisme model ganda, buruh bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam produksi nilai-lebih. Ada juga non-buruh yang hadir dalam berbagai bentuk "murah" seperti calon buruh, bahan mentah, bahan pangan, dan energi. Karena mereka ikut berkontribusi dalam produksi nilai-lebih, maka mereka juga harus dihitung sebagai agen perubahan.

Dalam kasus Covid-19, perubahan itu sangat dahsyat. Operasi kapitalisme telah membabat hutan, mengurug laut, menimbun rawa-rawa, menghambat aliran sungai, mencemari udara, dan lain-lain. Pendeknya, mendegradasi lingkungan. Degradasi lingkungan telah menyebabkan habitat patogen (virus, bakteri, dan mikro-organisme penyebab penyakit) mengalami degradasi. Mereka harus mencari habitat yang baru. Dan manusia adalah target empuk bagi mereka. Di titik ini, SARS-CoV-2 dapat dilihat sebagai elemen yang berada dalam sistem kapitalisme, namun dia tidak diuntungkan dari, atau justru dirugikan oleh, beroperasinya kapitalisme. Maka, sangat rasional kemudian kalau kita melihatnya menginginkan perubahan, atau yang dalam hal ini saya sebut sebagai revolusi.

ISBN